



# Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

## KECAMATAN PULAU HANAUT KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR Tahun Anggaran 2019



### VISI:

" TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG MADANI,  
DINAMIS, MANDIRI DAN BERDAYA SAING DALAM  
SUASANA RELIGIUS, KEBERSAMAAN, AMAN DAN  
SEJAHTERA "

### MISI:

" MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN  
YANG EFEKTIF DAN EFISIEN "

1. Kata Pengantar
2. Daftar Isi
3. Ikhtisar Eksekutif
4. LKIP Kec. Pulau Hanaut Tahun Anggaran 2019 (Bab I s/d Bab IV)
5. Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2019
6. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun Anggaran 2019
7. Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun Anggaran 2019
8. Pengukuran Kinerja Tahun Anggaran 2019

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami Panjatkan Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT karena atas Perkenan dan Rahmat-Nya, kami dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Satuan Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Pulau Hanaut Tahun 2019.

Laporan Kinerja merupakan bentuk Akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja adalah Pengukuran Kinerja dan Evaluasi serta Pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja, (*Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah*).

Laporan Kinerja Kecamatan Pulau Hanaut menginformasikan secara rinci upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian program dan kegiatan yang telah ditetapkan berdasarkan pada Sumber Daya Keuangan, Manusia dan Sarana Prasarana yang dimiliki secara transparan dengan harapan semoga laporan ini dapat memenuhi kebutuhan informasi berbagai pihak yang berkepentingan. Laporan ini juga menggambarkan perkembangan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka merespon tuntutan kebutuhan penyelenggaraan Otonomi Daerah, khususnya dalam rangka mewujudkan *Good Government Governance* (GGG), memberantas Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta meningkatkan kualitas Pelayanan Umum, semua ini merupakan terobosan dalam pembangunan dengan Sistem Akuntabilitas Negara Modern yang Handal, Demokratis, Profesional, Efisiensi, Efektif, Berkualitas, Bersih, Terbuka, Partisipatif dan tanggap terhadap Aspirasi Masyarakat.

Dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan diatas dan didasari keinginan yang luhur guna mewujudkan *Good Government Governance* (GGG) maka Kecamatan Pulau Hanaut sesuai dengan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam rangka pencapaian Visi dan Misi maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Pulau Hanaut Tahun 2019.

Informasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja ini diharapkan dapat menjadi refrensi umum bagi semua pihak dalam menyempurnakan dokumen perencanaan periode yang akan datang. Disamping itu juga Laporan Kinerja dapat dimanfaatkan untuk penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Bapinag, Januari 2020  
Camat Pulau Hanaut

**Ir.H. EDDY MASHAMY, MM**  
NIP. 19630827 199303 1 007

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iii
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	v
<b>BAB I    PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Dasar Hukum .....	2
C. Maksud dan Tujuan .....	3
D. Gambaran Umum Kecamatan Pulau Hanaut.....	3
E. Tugas Pokok dan Fungsi Serta Perencanaan Strategis Kecamatan .....	4
F. Isu Strategis .....	9
G. Sistematika Penyajian .....	10
<b>BAB II    PERENCANAAN KINERJA .....</b>	<b>12</b>
A. Indikator Kinerja Utama .....	12
B. Rencana Kinerja Tahunan 2019 .....	13
C. Perjanjian Kinerja .....	14
<b>BAB III    AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>18</b>
A. Capaian Kinerja Organisasi .....	18
B. Analisis Capaian Kinerja Kecamatan Pulau Hanaut Tahun 2019.....	20
C. Realisasi Anggaran .....	40
<b>BAB IV    PENUTUP .....</b>	<b>49</b>
A. Kesimpulan .....	49
B. Saran .....	50
<b>LAMPIRAN – LAMPIRAN .....</b>	

**DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1	Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pulau Hanaut Tahun 2019.....	13
Tabel 2.2	Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Pulau Hanaut Tahun 2019 .....	14
Tabel 2.3	Penetapan Kinerja Kecamatan Pulau Hanaut Tahun 2019 .....	16
Tabel 3.1	Kategori Pencapaian Kinerja .....	18
Tabel 3.2	Persentase Kategori Pencapaian Indikator Sasaran .....	19
Tabel 3.3	Pencapaian Target Sasaran Tahun 2019 .....	19
Tabel 3.4	Analisis Pencapaian Sasaran 1 “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Tahun 2019 dan Perbandingan dengan Target Akhir Renstra Tahun 2021 .....	20
Tabel 3.5	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 1 Tahun 2016 dan Tahun 2019.....	21
Tabel 3.6	Program/Kegiatan Penunjang Pencapaian Indikator Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2019 .....	23
Tabel 3.7	Perbandingan Realisasi Kinerja Sejak Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019 ...	25
Tabel 3.8	Data Usulan Musrenbang Desa yang Tertampung dalam Musrenbang RKPD di Kecamatan .....	25
Tabel 3.9	Program/Kegiatan Penunjang Pencapaian Indikator Usulan yang Tertampung Dalam Musrenbang RKPD di Kecamatan Pulau Hanaut Tahun 2019 .....	26
Tabel 3.10	Analisis Pencapaian Sasaran 2 Tahun 2017 dan Tahun 2019 .....	27
Tabel 3.11	Perbandingan Pencapaian Kinerja Sasaran 2 Tahun 2017 dan Tahun 2019 .....	28
Tabel 3.12	Program/Kegiatan yang mendukung tercapainya Indikator Persentase Desa yang tertib Administrasi Tahun 2019 .....	29
Tabel 3.13	Program dan Kegiatan yang mendukung tercapainya Indikator Persentase Lembaga Perekonomian Milik Desa .....	31
Tabel 3.14	Data PKK Desa di Kecamatan Pulau Hanaut Tahun 2019 .....	31
Tabel 3.15	Program/ Kegiatan Penunjang Pencapaian Indikator PKK Desa Aktif Tahun 2019	32
Tabel 3.16	Analisis Pencapaian Sasaran 2 “Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan” Tahun 2019 dan Perbandingan dengan Target Akhir Renstra .....	33
Tabel 3.17	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 3 Tahun 2017 dan Tahun 2019 .....	33
Tabel 3.18	Data Jumlah Pelanggaran/ Laporan Kejadian yang ditindaklanjuti oleh Kecamatan Pulau Hanaut Tahun 2019 .....	34
Tabel 3.19	Program/Kegiatan Penunjang Pencapaian Indikator Kinerja Persentase Pelanggaran Trantibmas yang Ditangani Tahun 2019 .....	35
Tabel 3.20	Jumlah Petugas Linmas di Kecamatan Pulau Hanaut Tahun 2019 .....	36
Tabel 3.21	Program/ Kegiatan Penunjang Pencapaian Indikator Persentase Jumlah Petugas Linmas Kecamatan/Desa Tahun 2019 .....	37
Tabel 3.22	Data Nilai AKIP Kecamatan Pulau Hanaut Tahun 2019 .....	38
Tabel 3.23	Target dan Realisasi Nilai AKIP Kecamatan Pulau Hanaut Tahun 2019 ....	39
Tabel 3.24	Program/Kegiatan Penunjang Pencapaian Indikator Nilai AKIP Kecamatan Pulau Hanaut Tahun 2019 .....	40
Tabel 3.25	Perbandingan Realisai Kinerja Sejak Tahun Tahun 2017 sampai dengan Tahun	40

	2019 .....	
Tabel 3.26	Alokasi dan Realisasi Anggaran Kecamatan Pulau Hanaut Tahun 2019 .....	41
Tabel 3.27	Sasaran, Indikator Sasaran dan Realisai Keuangan Kecamatan Pulau Hanaut Tahun 2019 .....	47

**IKHTISAR EKSEKUTIF**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Pada tahun 2019 ini, Kecamatan Pulau Hanaut telah melaksanakan 18 (delapan belas) program dengan didukung oleh 39 (tiga puluh sembilan) kegiatan. Seluruh kegiatan tersebut direncanakan sebagai bagian dari Rencana Kinerja Tahun 2019 untuk mencapai 4 (empat) sasaran atau dengan kata lain seluruh kegiatan diharapkan mempunyai kaitan sebab akibat dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan penilaian sendiri (*self assessment*) atas realisasi pelaksanaan Rencana Kinerja Tahun 2019, menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja dari 4 (empat) sasaran strategis yang telah ditetapkan dari 11 (sebelas) indikator pendukung adalah sebesar **98 %** dengan kategori **“Berhasil”**. Adapun mengenai beberapa sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut :

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1.	Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik yang Prima	Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik	Baik	100%
		Presentase usulan yang tertampung dalam hasil Musrenbang	100 %	100 %	100%
2.	Meningkatnya Penguatan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Prsentase desa/kelurahan yang telah selesai tata batas	100 %	100 %	100%
		Presentase desa/kelurahan yang tertib administrasi	80 %	80 %	100 %
		Presentase lembaga perekonomian milik desa/kelurahan	75 %	75 %	100 %
		Jumlah PKK desa/kelurahan yang aktif	14 Desa	6 Desa	85%
3.	Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Lingkungan	Presentase pelanggaran trantibmas yang ditangani	80 %	80 %	100%
		Jumlah petugas linmas di kecamatan, desa/kelurahan	80 orang	80 orang	100%
4.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai AKIP Kecamatan	60	55	95%
	CAPAIAN SASARAN				98 %

Secara keseluruhan Kecamatan Pulau Hanaut telah mengalokasikan pembiayaan seluruh belanja nya (Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung) sebesar **Rp. 4.896.641.650,00** dengan realisasi penyerapan sebesar **Rp. 4.517.338.511,00** atau capaian kinerja keuangan **92,25 %**. Dari total anggaran tersebut, yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan utama 4 (empat) sasaran strategis adalah **Rp. 3.123.022.000** dan realisasi penyerapan pembiayaan sasaran sebesar **Rp.2.908.192.655** atau **93.12 %**.

Demikian yang dapat kami sampaikan, terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan LKIP Tahun 2019 ini, semoga dengan LKIP ini menjadikan Kecamatan Pulau Hanaut sebagai instansi yang transparan dan berakuntabilitas.





## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **AKHMAD ZUHDI, S.Pd**

Jabatan : **Plt.Kasi Tata Pemerintahan**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Ir.H.EDDY MASHAMY, MM**

Jabatan : **Camat Pulau Hanaut**

Selaku atasan **Pihak Pertama** Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

**Pihak Pertama** berjanji mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.

**Pihak Kedua** akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bapinang, 2 Januari 2019

Pihak Kedua,  
**CAMAT PULAU HANAUT**

Pihak Pertama,  
**Plt.KASI TATA PEMERINTAHAN**

**Ir.H.EDDY MASHAMY, MM**  
**NIP. 19630827 199303 1 007**

**AKHMAD ZUHDI, S.Pd**  
**NIP. 19630815 198609 1003**



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **AKHMAD KUSASI, S.Pd**

Jabatan : Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Ir.H.EDDY MASHAMY, MM**

Jabatan : Camat Pulau Hanaut

Selaku atasan **Pihak Pertama** Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

**Pihak Pertama** berjanji mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.

**Pihak Kedua** akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bapinang, 2 Januari 2019

Pihak Kedua,  
**CAMAT PULAU HANAUT**

Pihak Pertama,  
**KASI KETENTRAMAN DAN  
KETERTIBAN UMUM**

**Ir.H.EDDY MASHAMY, MM**  
**NIP. 19630827 199303 1 007**

**AKHMAD KUSASI**  
**NIP. 19630920 198603 1 013**



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **H.SYAHRUN,S.Pd**

Jabatan : Kasi Administrasi

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Ir.H.EDDY MASHAMY, MM**

Jabatan : Camat Pulau Hanaut

Selaku atasan **Pihak Pertama** Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

**Pihak Pertama** berjanji mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami **Pihak Pertama**.

**Pihak Kedua** akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bapinang, 2 Januari 2019

Pihak Kedua,  
**CAMAT PULAU HANAUT**

Pihak Pertama,  
**KASI ADMINISTRASI**

**Ir.H.EDDY MASHAMY, MM**  
**NIP. 19630827 199303 1 007**

**H.SYAHRUN,S.Pd**  
**NIP. 19630331 198308 1 002**



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **RIYANTO DWIATMOJO**

Jabatan : Kasi Pembangunan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Ir.H.EDDY MASHAMY, MM**

Jabatan : Camat Pulau Hanaut

Selaku atasan **Pihak Pertama** Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

**Pihak Pertama** berjanji mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.

**Pihak Kedua** akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bapinang, 2 Januari 2019

Pihak Kedua,  
**CAMAT PULAU HANAUT**

Pihak Pertama,  
**KASI PEMBANGUNAN**

**Ir.H.EDDY MASHAMY, MM**  
**NIP. 19630827 199303 1 007**

**RIYANTO DWIATMOJO**  
**NIP. 19640107 198803 1 008**



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SRI HARTINI, S.Sos**

Jabatan : Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Ir.H.EDDY MASHAMY, MM**

Jabatan : Camat Pulau Hanaut

Selaku atasan **Pihak Pertama** Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

**Pihak Pertama** berjanji mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

**Pihak Kedua** akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bapinang, 2 Januari 2019

Pihak Kedua,  
**CAMAT PULAU HANAUT**

Pihak Pertama,  
**KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DAN DESA**

**Ir.H.EDDY MASHAMY, MM**  
**NIP. 19630827 199303 1 007**

**SRI HARTINI, S.Sos**  
**NIP. 19650426 198603 2 020**



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **RIDUAN SANTANA, A.Md**  
Jabatan : Plt. Kasubbag Umum dan Pelaporan  
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Ir.H.EDDY MASHAMY, MM**  
Jabatan : Camat Pulau Hanaut  
Selaku atasan **Pihak Pertama** Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

**Pihak Pertama** berjanji mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.

**Pihak Kedua** akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bapinang, 2 Januari 2019

Pihak Kedua,  
**CAMAT PULAU HANAUT**

Pihak Pertama,  
**Plt. KASUBBAG UMUM DAN PELAPORAN**

**Ir.H.EDDY MASHAMY, MM**  
**NIP. 19630827 199303 1 007**

**RIDUAN SANTANA, A.Md**  
**NIP. 19760914 201101 1 003**



## **PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **DEDY AGUNG PRASETYO, S.Sos**

Jabatan : Kasubbag Keuangan dan Perencanaan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Ir.H.EDDY MASHAMY, MM**

Jabatan : Camat Pulau Hanaut

Selaku atasan **Pihak Pertama** Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

**Pihak Pertama** berjanji mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.

**Pihak Kedua** akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bapinang, 2 Januari 2019

Pihak Kedua,  
**CAMAT PULAU HANAUT**

Pihak Pertama,  
**KASUBBAG KEUANGAN DAN PERENCANAAN**

**Ir.H.EDDY MASHAMY, MM**  
**NIP. 19630827 199303 1 007**

**DEDY AGUNG PRASETYO, S.Sos**  
**NIP. 19800723 200701 1 005**



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Ir.H.EDDY MASHAMY, MM**

Jabatan : Camat Pulau Hanaut

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **H. SUPIAN HADI, S.IKom, M.E**

Jabatan : Bupati Kotawaringin Timur

Selaku atasan **Pihak Pertama** Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

**Pihak Pertama** berjanji mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.

**Pihak Kedua** akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bapinang, Januari 2019

Pihak Kedua,  
**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR**

Pihak Pertama,  
**CAMAT PULAU HANAUT**

**H.SUPIAN HADI, S.Ikom, M.E**

**Ir.H.EDDY MASHAMY, MM**  
**NIP. 19630827 199303 1 007**



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Ir.H.EDDY MASHAMY, MM**

Jabatan : Camat Pulau Hanaut

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **H. SUPIAN HADI, S.IKom**

Jabatan : Bupati Kotawaringin Timur

Selaku atasan **Pihak Pertama** Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

**Pihak Pertama** berjanji mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.

**Pihak Kedua** akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bapinang, Januari 2020

Pihak Kedua,  
**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR**

Pihak Pertama,  
**CAMAT PULAU HANAUT**

**H.SUPIAN HADI, S.Ikom, M.E**

**Ir.H.EDDY MASHAMY, MM**  
**NIP. 19630827 199303 1 007**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**KECAMATAN PULAU HANAUT**  
**KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2016-2021**

1. Nama/ Unit Organisasi : Kecamatan Pulau Hanaut
2. Tugas : Melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan ekonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintah
3. Fungsi
  - a. Melaksanakan semua pelimpahan kewenangan yang diserahkan oleh Bupati Kotawaringin Timur
  - b. Melaksanakan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat
  - c. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
  - d. Melaksanakan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan yang berlaku
  - e. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan, memberikan pembinaan kepada pemerintah desa/kelurahan
  - f. Melaksanakan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat
  - g. Melaksanakan pengawasan pelaksanaan pembangunan secara umum maupun di bidang pendidikan dan kesehatan di wilayah Kecamatan
  - h. Memberikan pelayanan administrasi semua perjanjian yang dilimpahkan
  - i. Melaksanakan pelayanan administrasi berupa rekomendasi kepada warga masyarakat
  - j. Melaksanakan koordinasi di bidang pembangunan, pemerintah dan kemasyarakatan di wilayah Kecamatan
  - k. Melaksanakan koordinasi dengan unsur muspika, UPTD, atau unit kerja yang ada di Wilayah Kecamatan
  - l. Melaksanakan pembinaan kepada aparatur pemerintahan dan warga masyarakat di wilayah Kecamatan
  - m. Memfasilitasi semua permasalahan yang ada di Wilayah Kecamatan
  - n. Melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan ketertiban umum di Wilayah Kecamatan
4. Indikator Kinerja Umum :

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	
				FORMULASI / RUMUSAN PERHITUNGAN	SUMBER DATA
					<b>SKPD PENANGGUNG JAWAB / PELAKSANA</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima	Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	Hasil survei kepuasan masyarakat (Permenpan 16 Tahun 2014 dan SK Menpan Nomor 25 Tahun 2014)	- Sekretariat Kecamatan - Kasi Administrasi - Hasil Survei
		Persentase usulan yang tertampung dalam hasil Musrenbang RKPD di Kecamatan	%	$\frac{\text{Jumlah usulan hasil musrenbang RKPD di Kecamatan Pulau Hanaut}}{\text{Jumlah usulan hasil musrenbang desa yang disampaikan ke Kecamatan Pulau Hanaut}} \times 100$	- Kasi Pembangunan - Hasil Musrenbang Kelurahan dan Musrenbang di Kecamatan

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	
				FORMULASI / RUMUSAN PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
2.	Meningkatnya kualitas pemerintahan desa	Persentase desa/kelurahan yang telah selesai tata batas	%	$\frac{\text{Jumlah Desa yang selesai tata batas di Kecamatan}}{\text{Jumlah Desa yang ada di Kecamatan}} \times 100$	- Kasi Tata Pemerintahan - Berita Acara Kesepakatan Batas Kelurahan/Desa di Kecamatan
		Persentase desa/kelurahan yang tertib administrasi	%	$\frac{\text{Jumlah Desa yang dievaluasi}}{\text{Jumlah Desa yang ada di Kecamatan}} \times 100$	- Kasi PMD - Hasil penilaian evaluasi Desa/Kelurahan di Kecamatan
		Persentase lembaga perekonomian milik desa/kelurahan	%	$\frac{\text{Jumlah BUMDesa yang ada di Kecamatan}}{\text{Jumlah Desa yang ada di Kecamatan Pulau Hanaut}} \times 100$	- Kasi PMD - Data Desa (BUMDes)
		Jumlah PKK Desa/Kelurahan/Desa	Jumlah	Data jumlah PKK Desa aktif	- Kasi PMD - PKK Kecamatan
3.	Meningkatnya Peningkatan ketentraman keteriban lingkungan	Persentase pelanggaran trantibmas yang ditangani	%	$\frac{\text{Jumlah pelanggaran Keamanan dan Ketertiban yang ditangani}}{\text{Jumlah pelanggaran Keamanan dan Ketertiban yang terjadi di masyarakat}} \times 100$	- Kasi Tata Pemerintahan - Kasi Trantibum Kecamatan - Polsek Pulau Hanaut - Dan Ramil 1015-07 Bapinang
		Jumlah petugas Linmas di Kecamatan/Kelurahan/Desa	Jumlah	Jumlah petugas Linmas Kecamatan / Desa yang dilatih / dibina	- Kasi Trantibum Kecamatan
4.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan	Nilai AKIP Kecamatan	Nilai	Laporan hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) Kecamatan oleh Inspektorat	- Sekretariat Kecamatan

Bapinang, Januari 2019  
Camat Pulau Hanaut

**Ir.H.EDDY MASHAMY, MM**  
NIP. 19630827 199303 1 007

**PENGUKURAN KINERJA  
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
KECAMATAN PULAU HANAUT  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR  
TAHUN 2019**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	TARGET KINERJA	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI			
						TARGET	%	ANGGARAN (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima	1. Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	1. Program pelayanan administrasi perkantoran	Baik	802.480.200	Baik	100,00	800.662.427	99,77
			2.Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	1.586.501.360	100%	100.00	1.389.468.804	87,58
			3.Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	48.900.000	100%	100.00	48.900.000	100,00
			4.Program Pengelolaan Keragaman Budaya	100%	5.000.000	100%	100.00	5.000.000	100,00
			5.Program Penataan Daerah Otonomi Baru	100%	600.725.000	100%	100.00	598.588.444	98.15
		2. Persentase usulan yang tertampung dalam hasil Musrenbang RKPD di Kecamatan	1.Program Perencanaan Pembangunan Daerah						
2.	Meningkatnya kualitas pemerintahan desa	3. Persentase desa/kelurahan yang telah selesai tata batas	1.Program Penataan Daerah Otonomi Baru	100 %	-	100 %	100,00	-	100,00
		4. Persentase desa/kelurahan yang tertib administrasi	1.Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun Desa						
			2.Program Pembinaan dan Fasilitas Pegelolaan Keuangan Desa						
		5. Pelaksanaan Sampit Exspo	1.Program Peningkatan Promosi dan Investasi Daerah	100 %	14.715.440	100 %	100,00	14.715.440	100,00
		6. Jumlah PKK Desa/Kelurahan/Desa	1.Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan	14 PKK	48.340.000	14 PKK	99,98	48.340.000	99,98
3.	Peningkatan ketentraman keteriban lingkungan	7. Persentase pelanggaran trantibmas yang ditangani	1.Program Pengendalian Kebakaran Hutan	100 %	8.000.000	100 %	100,00	8.000.000	100,00
			2.Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan						
			3.Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan						
		8. Jumlah petugas Linmas di Kecamatan/Kelurahan/Desa	1.Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	45 orang		45 orang	100,00		99,15
			2. Program Disiplin aparatur						

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	TARGET KINERJA	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI			
						TARGET	%	ANGGARAN (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan	Nilai AKIP Kecamatan	1.Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	55		53,39	97,07		100
				100 %	-	100 %	100,00	-	-
CAPAIAN KINERJA / REALISASI ANGGARAN					3.123.022.000		93,12	2.908.192.655	93,12

Bapinang, Januari 2019  
Camat Pulau Hanaut

**Ir.H.EDDY MASHAMY, MM**  
NIP. 19630827 199303 1 007

## RENCANA AKSI

**Nama/ Unit Organisasi : Kecamatan Pulau Hanaut**  
**Tahun Anggaran : 2020**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KEGIATAN	RENCANA PELAKSANAAN				PELAKSANA
					T1	T2	T3	T4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Prima	Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik	Melakukan kegiatan survei IKM di Kecamatan				√	Sekretariat Kecamatan Pulau Hanaut
		Persentase usulan yang tertampung dalam hasil Musrenbang RKPD di Kecamatan	100%	Melaksanakan Kegiatan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan	√				Kasi Pembangunan Kecamatan Pulau Hanaut
2.	Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Desa	Persentase desa/kelurahan yang telah selesai tata batas	100%	Melaksanakan Rapat Penetapan Batas Kelurahan/Desa di Kecamatan	√	√	√	√	Kasi Pemerintahan Kecamatan Pulau Hanaut
		Persentase desa/kelurahan yang tertib administrasi	80 %	Melaksanakan Penilaian/ Evaluasi Perkembangan Desa/ Kelurahan dan Penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan Desa	√			√	Kasi PMD Kecamatan Pulau Hanaut
		Persentase lembaga perekonomian milik desa/kelurahan	75%	Mengikuti Kegiatan Sampit Expo	√				Kasi PMD dan Kasi Pembangunan Kecamatan Pulau Hanaut
		Jumlah PKK Desa/Kelurahan/Desa	7	Melaksanakan Pembinaan Pengurus dan Anggota PKK Kecamatan/ Kelurahan/ Desa	√	√	√	√	Kasi PMD Kecamatan Pulau Hanaut
3.	Meningkatnya Peningkatan Ketentraman Keteriban Lingkungan	Persentase pelanggaran trantibmas yang ditangani	80 %	Melaksanakan Rapat Penyelesaian sengketa lahan, dan pembinaan pengurus RT/RW untuk menjaga keamanan dan ketertiban dimasyarakat serta kegiatan sosialisasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan	√	√	√	√	Kasi Pemerintahan dan Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Pulau Hanaut, Polsek Pulau Hanaut dan Dan Ramil 1015-07 Bapinang
		Jumlah petugas linmas di Kecamatan/Kelurahan/Desa	45 orang	Melaksanakan kegiatan Pembinaan Linmas Kecamatan/Kelurahan/Desa untuk meningkatkan keamanan lingkungan		√			Kasi Trantib Kecamatan Pulau Hanaut

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KEGIATAN	RENCANA PELAKSANAAN				PELAKSANA
					T1	T2	T3	T4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai AKIP Kecamatan	55	Pembuatan laporan akuntabilitas kinerja (LKIP) Kecamatan Pulau Hanaut dan Laporan Keuangan Kecamatan Pulau Hanaut.	√	√	√	√	Sekretariat Kecamatan Pulau Hanaut

**Keterangan :**    √    ( Pelaksana Kegiatan)

Bapinang,    Januari 2020  
Camat Pulau Hanaut

**Ir.H.EDDY MASHAMY, MM**  
NIP. 19630827 199303 1 007

## RENCANA AKSI

Nama/ Unit Organisasi : Kecamatan Pulau Hanaut

Tahun Anggaran : 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KEGIATAN	RENCANA PELAKSANAAN				PELAKSANA
					T1	T2	T3	T4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Prima	Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik	Melakukan kegiatan survei IKM di Kecamatan					Sekretariat Kecamatan Pulau Hanaut
		Persentase usulan yang tertampung dalam hasil Musrenbang RKPD di Kecamatan	100%	Melaksanakan Kegiatan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan					Kasi Pembangunan Kecamatan Pulau Hanaut
2.	Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Desa	Persentase desa/kelurahan yang telah selesai tata batas	100%	Melaksanakan Rapat Penetapan Batas Kelurahan/Desa di Kecamatan					Kasi Pemerintahan Kecamatan Pulau Hanaut
		Persentase desa/kelurahan yang tertib administrasi	80 %	Melaksanakan Penilaian/ Evaluasi Perkembangan Desa/ Kelurahan dan Penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan Desa					Kasi PMD Kecamatan Pulau Hanaut
		Persentase lembaga perekonomian milik desa/kelurahan	75%	Mengikuti Kegiatan Sampit Expo					Kasi PMD dan Kasi Pembangunan Kecamatan Pulau Hanaut
		Jumlah PKK Desa/Kelurahan/Desa	7	Melaksanakan Pembinaan Pengurus dan Anggota PKK Kecamatan/ Kelurahan/ Desa					Kasi PMD Kecamatan Pulau Hanaut
3.	Meningkatnya Peningkatan Ketentraman Keteriban Lingkungan	Persentase pelanggaran trantibmas yang ditangani	80%	Melaksanakan Rapat Penyelesaian sengketa lahan, dan pembinaan pengurus RT/RW untuk menjaga keamanan dan ketertiban dimasyarakat serta kegiatan sosialisasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan					Kasi Pemerintahan dan Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Pulau Hanaut, Polsek Pulau Hanaut dan Dan Ramil 1015-07 Bapinang
		Jumlah petugas linmas di Kecamatan/Kelurahan/Desa	80 Orang	Melaksanakan kegiatan Pembinaan Linmas Kecamatan/Kelurahan/Desa untuk meningkatkan keamanan					Kasi Trantib Kecamatan Pulau Hanaut

				lingkungan					
--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KEGIATAN	RENCANA PELAKSANAAN				PELAKSANA
					T1	T2	T3	T4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai AKIP Kecamatan	58,80	Pembuatan laporan akuntabilitas kinerja (LKIP) Kecamatan Pulau Hanaut dan Laporan Keuangan Kecamatan Pulau Hanaut.					Sekretariat Kecamatan Pulau Hanaut

Bapinang, Januari 2020  
Camat Pulau Hanaut

**Ir.H.EDDY MASHAMY, MM**  
NIP. 19630827 199303 1 007

PERJANJIAN KINERJA PEGAWAI

NAMA : Ir.H.EDDY MASHAMY, MM  
NIP : 19630827 199303 1 007  
PANGKAT/GOL : Pembina Tk.I (IV/b)  
JABATAN : CAMAT PULAU HANAUT  
SOPD : KECAMATAN PULAU HANAUT  
TAHUN : 2019

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
				OUTPUT/OUTCOME
1	2	3	4	5
1.	Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik yang Prima	1. Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	Baik
		2. Prosentase Usulan yang tertampung dalam hasil	Persentase	100%
2.	Meningkatnya Penguatan Pemerintahan desa/kelurahan	1. Prosentase desa/kelurahan yang telah selesai tata batas	Persentase	100%
		2. Prosentase desa/kelurahan yang tertib administrasi	Persentase	80%
		3. Prosentase lembaga perekonomian milik	Persentase	75%
		4. Jumlah PPK desa/kelurahan yang aktif	Jumlah	9 Desa
3.	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan	1. Prosentase pelanggaran trantibmas yang ditangani	Persentase	80%
		2. Jumlah petugas linmas di kecamatan/kelurahan/desa	Jumlah	80 Orang
4.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	1. Nilai AKIP Kecamatan	Nilai	55

NO	PROGRAM	JUMLAH ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp802.480.200	APBD
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp1.586.501.360	APBD
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp40.900.000	APBD
4.	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Rp5.000.000	APBD
5	Program Peningkatan Promosi dan Investasi Daerah	Rp14.715.440	APBD
6	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Rp9.460.000	APBD
7	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Rp600.725.000	APBD
8	Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan	Rp48.240.000	APBD
9	Program Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Rp8.000.000	APBD
10	Program Pembinaan Pemberdayaan Remaja,Pemuda, Perempuan dan Olahraga	Rp7.000.000	APBD
		<b>Rp3.123.022.000</b>	

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR



H.SUPIAN HADI, S.Ikom, M.E

Bapinang, Oktober 2019  
CAMAT PULAU HANAUT



Ir.H.EDDY MASHAMY, MM  
NIP. 19630827 199303 1 007

PERJANJIAN KINERJA PEGAWAI

NAMA : Ir.H.EDDY MASHAMY, MM  
NIP : 19630827 199303 1 007  
PANGKAT/GOL : Pembina Tk.I(IV/b)  
JABATAN : CAMAT PULAU HANAUT  
SOPD : KECAMATAN PULAU HANAUT  
TAHUN : 2020

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
				OUTPUT/ OUTCOME
1	2	3	4	5
1.	Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik yang Prima	1. Rata-rata Indeks Kepuasan M 2. Prosentase Usulan yang tertampung dalam hasil	Nilai Persentase	Baik 100%
2.	Meningkatnya Penguatan Pemerintahan desa/kelurahan	1. Prosentase desa/kelurahan yang telah selesai tata batas 2. Prosentase desa/kelurahan yang tertib administrasi 3. Prosentase lembaga perekonomian milik 4. Jumlah PKK desa/kelurahan y	Persentase Persentase Persentase Jumlah	100% 85% 80% 7 Desa
3.	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan	1. Prosentase pelanggaran trantibmas yang ditangani 2. Jumlah petugas linmas di kecamatan / kelurahan /desa	Persentase Jumlah	85% 50 Orang
4.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	1. Nilai AKIP Kecamatan	Nilai	56

NO	PROGRAM	JUMLAH ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp695.668.200	APBD
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp159.845.000	APBD
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp15.000.000	APBD
4	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Rp15.000.000	APBD
5	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Rp184.350.000	APBD
6	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Rp5.000.000	APBD
7	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Rp8.565.000	APBD
8	Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan	Rp16.000.000	APBD
9	Program Pembinaan / Pemberdayaan Remaja, Pemuda, Perempuan dan Olah Raga	Rp3.050.000	APBD
10	Program Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Rp4.000.000	APBD
		<b>Rp1.106.478.200</b>	

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR

H.SUPIAN HADI, S.Ikom, M.E

Bapinang, Januari 2020  
CAMAT PULAU HANAUT

Ir.H.EDDY MASHAMY, MM  
NIP. 19630827 199303 1 007

PERJANJIAN KINERJA PEGAWAI

NAMA : RIYANTO DWIATMOJO  
NIP : 19640107 198803 1 008  
PANGKAT/GOL : Penata (III/c)  
JABATAN : Kasi Pembangunan  
SOPD : KECAMATAN PULAU HANAUT  
TAHUN : 2019

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET OUTPUT/ OUTCOME
1	2	3	4	5
1.	Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik yang Prima	Prosentase Usulan yang tertampung dalam hasil Musrenbang	%	100%

NO	KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur	Rp1.586.501.360	APBD

CAMAT PULAU HANAUT

Ir.H.EDDY MASAHPY, MM  
NIP. 19630827 199303 1 007

Bapinang, 02 Januari 2019

KASI PEMBANGUNAN

RIYANTO DWIATMOJO  
NIP.19640107 198803 1 008

PERJANJIAN KINERJA PEGAWAI

NAMA :SRI HARTINI, S.Sos  
NIP :19650426 198603 2 020  
PANGKAT/GOL Penata Tk.I (III/d)  
JABATAN Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
SOPD :KECAMATAN PULAU HANAUT  
TAHUN 2019

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET OUTPUT/ OUTCOME
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Penguatan Pemerintahan desa/ kelurahan	Prosentase desa/kelurahan yang tertib administrasi	%	85%
		Prosentase lembaga perekonomian milik desa/kelurahan	%	80%
		Jumlah PPK desa/kelurahan yang Aktif	Jumlah	14 Desa

NO	KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Evaluasi Pengembangan Desa dan Kelurahan		APBD
2.	Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes		APBD
3.	Pembinaan Kegiatan PKK Kecamatan/Kelurahan/Desa	Rp 48.240.000	APBD
4.	Kegiatan Keagamaan, Kemasyarakatan dan hari-hari besar Nasional/Daerah	Rp 400.975.000	APBD
5.	Kegiatan Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi melalui Pelaksanaan Kegiatan Sampit Expo	Rp 14.715.440	APBD

Bapinang, 02 Januari 2019

CAMAT PULAU HANAUT

Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Ir.H.EDDY MASAHPY, MM  
NIP. 19630827 199303 1 007

SRI HARTINI, S.Sos  
NIP.19650426 198603 2 020

**PERJANJIAN KINERJA PEGAWAI**

NAMA : AHKMAD KUSASI, S.Pd  
NIP : 19630920 198603 1 013  
PANGKAT/GOL : Pembina (IV/a)  
JABATAN : Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum  
SOPD : KECAMATAN PULAU HANAUT  
TAHUN : 2019

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET OUTPUT/ OUTCOME
1	2	3	4	5
1.	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan	Prosentase pelanggaran trantibmas yang ditangani	%	85%
		Jumlah petugas linmas di kecamatan /kelurahan/desa	Jumlah	80 Orang

NO	KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan	Rp 9.460.000	APBD
2.	Kegiatan Koordinasi dan Sosialisasi Pengendalian dan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	Rp 8.000.000	APBD

Bapinang, 02 Januari 2019

CAMAT PULAU HANAUT

Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Ir.H.EDDY MASAHPY, MM  
NIP. 19630827 199303 1 007

AHKMAD KUSASI  
NIP.19630920 198603 1 013

PERJANJIAN KINERJA PEGAWAI

NAMA : H.SYHRUN, SPd  
NIP : 196331 198308 1 002  
PANGKAT/GOL : Pembina (IV/a)  
JABATAN : Kasi Administrasi  
SOPD : KECAMATAN PULAU HANAUT  
TAHUN : 2019

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KERGIATAN	SATUAN	TARGET  OUTPUT/OUTCOME
1	2	3	4	5
1.	Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik yang Prima	Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	Baik

NO	KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran yang mendukung kualitas Pelayanan Publik yang Prima	Rp 802.480.200	APBD
2.	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp 40.900.000	APBD
3.	Kegiatan Penataan Administrasi Kependudukan		APBD

Bapinang, 02 Januari 2019

CAMAT PULAU HANAUT

Kasi Administrasi

Ir.H.EDDY MASAHPY, MM  
NIP. 19630827 199303 1 007

H.SYHRUN, SPd  
NIP.196331 198308 1 002

PERJANJIAN KINERJA PEGAWAI

NAMA  
NIP  
PANGKAT/GOL  
JABATAN  
SOPD  
TAHUN

AKHMAD ZUHDI, S.Pd  
19630815 198309 1 003  
Pembina (IV/a)  
Kasi Tata Pemerintahan  
KECAMATAN PULAU HANAUT  
2019

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET OUTPUT/OUTCOME
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Penguatan Pemerintahan desa /kelurahan	Prosentase desa/kelurahan yang telah selesai tata batas	%	100%
		Prosentase lembaga perekonomian milik desa/kelurahan	%	80%
2.	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan	Prosentase pelanggaran trantibmas yang ditangani	%	85%

NO	KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Kegiatan Keagamaan, Kemasyarakatan dan hari-hari besar Nasional/Daerah	Rp 400.975.000	APBD
2.	Kegiatan Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi melalui Pelaksanaan Kegiatan Sampit Expo	Rp 14.715.440	APBD
3.	Kegiatan Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan		APBD
4.	Kegiataan Pembinaan Pengurus Rt/RW se-Kecamatan		APBD

Bapinang, 02 Januari 2019

CAMAT PULAU HANAUT

Plt.Kasi Tata Pemerintahan

Ir.H.EDDY MASAHPY, MM  
NIP. 19630827 199303 1 007

AKHMAD ZUHDI, S.Pd  
NIP.19630815 198309 1 003

PERJANJIAN KINERJA PEGAWAI

NAMA  
NIP  
PANGKAT/GOL  
JABATAN  
SOPD  
TAHUN

RIDUAN SANTANA, A.Md  
19760914 201101 1003  
Penata Muda (III/a)  
Plt.Kasubbag Umum dan Pelaporan  
KECAMATAN PULAU HANAUT  
2019

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET OUTPUT/ OUTCOME
1	2	3	4	5
1.	Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik yang Prima	Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	Baik

NO	KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 1.586.581.360	APBD
2.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp 40.900.000	APBD

Bapinang 02 Januari 2019

CAMAT PULAU HANAUT

Plt.Kasubbag Umum dan Pelaporan

Ir.H.EDDY MASAHPY, MM  
NIP. 19630827 199303 1 007

RIDUAN SANTANA, A.Md  
NIP.19760914 201101 1003

PERJANJIAN KINERJA PEGAWAI

NAMA

NIP

PANGKAT/GOL

JABATAN

SOPD

TAHUN

DEDY AGUNG PRASETYO, S.Sos

: 19800723 200701 1 005

: Penata Muda Tk.I (III/b)

: Kasubbag Keuangan dan Perencanaan

: KECAMATAN PULAU HANAUT

: 2019

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET OUTPUT/ OUTCOME
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai AKIP Kecamatan	Nilai	56

NO	KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Kegiatan Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan capaian Kinerja dan keuangan		APBD
2.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 802.480.200	APBD

Bapinang, 02 Januari 2019

CAMAT PULAU HANAUT

Kasubbag Keuangan dan Perencanaan

Ir,H.EDDY MASHAMY, MM  
NIP. 19630827 199303 1 007

DEDY AGUNG PRASETYO, S.Sos  
NIP.19800723 200701 1 005

RENCANA KINERJA TAHUNAN  
TINGKAT SATUAN PERANGKAT DAERAH  
KECAMATAN PULAU HANAUT  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR  
TAHUN 2019

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
			KINERJA
1	2	3	4
1.	Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik yang Prima	1. Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik
		2. Persentase Usulan yang tertampung dalam hasil Musrenbang	100
2.	Meningkatnya Penguatan Pemerintahan desa/kelurahan	1. Persentase desa/kelurahan yang telah selesai tata batas	100
		2. Persentase desa/kelurahan yang tertib administrasi	80
		3. Persentase lembaga perekonomian milik desa/kelurahan	75
		4. Jumlah PPK desa/kelurahan yang aktif	14 Desa
3.	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan	1. Persentase pelanggaran trantibmas yang ditangani	80
		2. Jumlah petugas linmas di kecamatan/kelurahan/desa	80 Orang
4.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	1. Nilai AKIP Kecamatan	55

Mengetahui  
CAMAT PULAU HANAUT

Ir.H.EDDY MASHAMY, MM  
NIP. 19630827 199303 1 007

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Salah satu tuntutan publik pada saat ini adalah adanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan sekaligus kinerja negara. Tuntutan tersebut bertujuan agar terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance), sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara bersih, bertanggungjawab dan memberikan dampak (impact) serta manfaat (benefit) dari hasil (outcome) yang diperoleh. Good Governance atau tata kelola pemerintahan yang baik memiliki beberapa karakteristik yaitu (1) Partisipasi; (2) Taat Hukum; (3) Transparansi; (4) Responsibilitas; (5) Berorientasi pada Musyawarah Mufakat; (6) Keadilan; (7) Efektif dan Efisien; (8) Akuntabilitas; (9) Visi Strategis. Salah satu dari karakteristik tersebut terdapat Akuntabilitas yang dianggap paling menentukan karena setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berlakunya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Instansi Pemerintah yang berada di pusat dan daerah diharuskan melaporkan setiap hasil capaian kinerja yang dituangkan dalam bentuk laporan. Berdasarkan hal itu maka dikeluarkan sebuah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat dengan SAKIP, adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengiktisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

SAKIP berlaku untuk semua instansi yang ada di pusat maupun daerah dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya, sehingga diharapkan SOPD tersebut dapat melaksanakan setiap kegiatannya sesuai dengan yang direncanakan sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan visi, misi dan strategi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan hal tersebut, Kecamatan Pulau Hanaut sebagai bagian dari instansi pemerintah memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan visi dan misi dari Kecamatan Pulau Hanaut yang terdiri dari berbagai komponen. Laporan kinerja dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Kecamatan Pulau Hanaut pada tahun 2019, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Laporan ini juga diharapkan sebagai alat bantu memperoleh suatu simpulan pencapaian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta dapat digunakan sebagai tolak ukur.

## **B. DASAR HUKUM**

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2000 Nomor 23);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 180);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 54 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Rincian Tugas Pokok, Fungsi Serta Uraian Tugas Kecamatan Kabupaten Kotawaringin Timur;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur No. 01 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur 2006-2010.

### C. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dari Laporan ini adalah memberikan gambaran, penjelasan dan penyajian data baik secara kuantitas maupun kualitas potensi yang ada di Kecamatan Pulau Hanaut sebagai bahan masukan langkah kedepan. Lebih lanjut memenuhi kewajiban sebagai Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) dalam hal Akuntabilitas Kinerja sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014.

Sedangkan tujuan dari Laporan ini adalah menyampaikan tentang upaya kerja yang telah dilakukan dan kinerja untuk mewujudkan serta melaksanakan program-program yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur. Selain itu juga menggambarkan secara singkat dan jelas keadaan dan potensi wilayah Kecamatan Pulau Hanaut pada tahun 2019, dan hasil yang telah dicapai dari kegiatan Camat Pulau Hanaut sebagai pimpinan/penanggung jawab Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) dalam mengemban tugas, tanggung jawab dan melaksanakan sebagian wewenang yang telah diberikan oleh Bupati Kotawaringin Timur.

### D. GAMBARAN UMUM KECAMATAN PULAU HANAUT

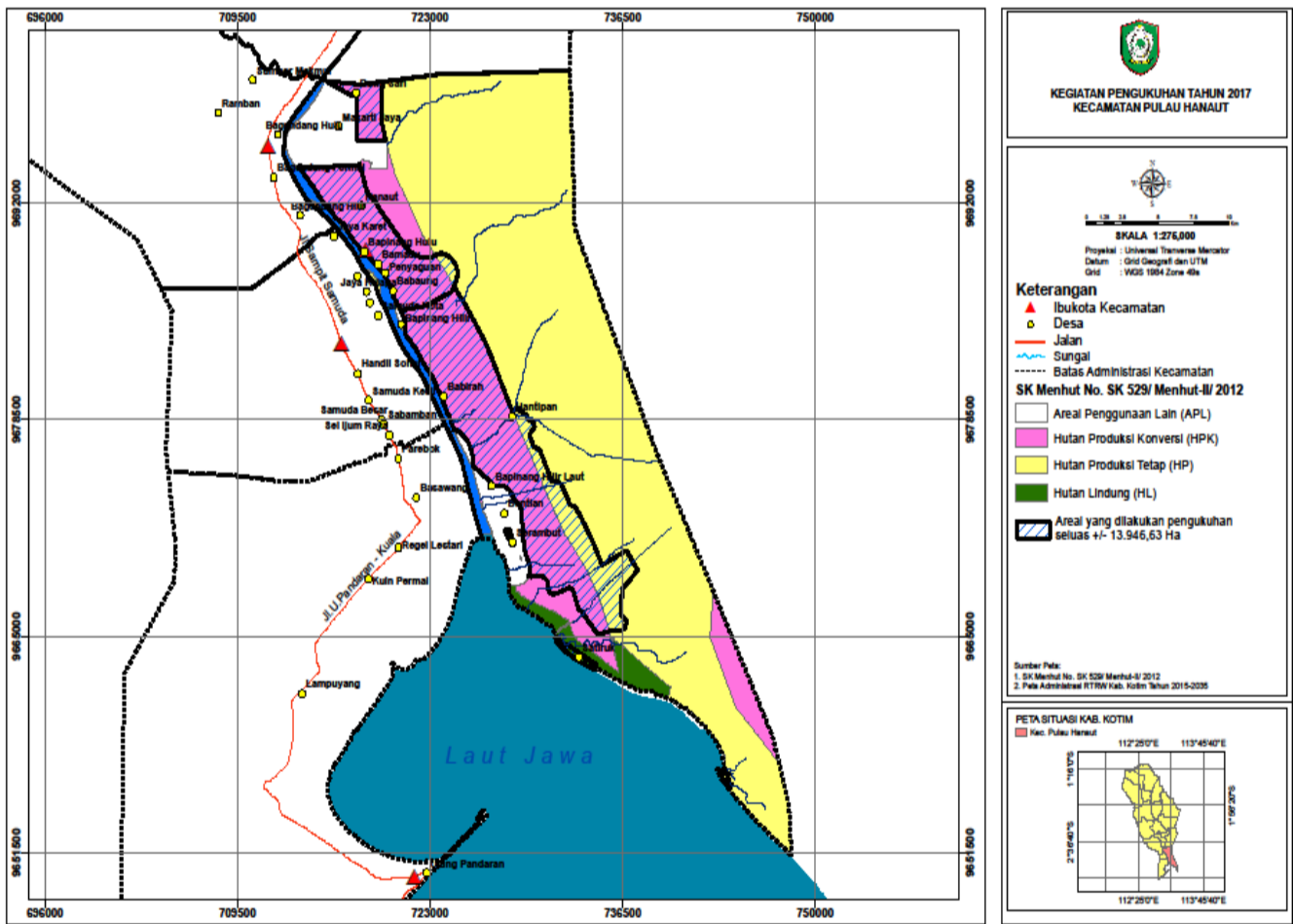
Kecamatan Pulau Hanaut adalah wilayah kerja Camat Pulau Hanaut sebagai perangkat daerah Kabupaten Kotawaringin Timur. Kecamatan Pulau Hanaut merupakan salah satu dari 18 Kecamatan yang terdapat di Kabupaten Kotawaringin Timur memiliki luas wilayah  $\pm$  96587,26 Ha dengan jumlah penduduk per 31 Desember 2018 sebanyak 16.365 jiwa / 4.648 KK. Wilayah Kecamatan Pulau Hanaut secara administrasi pemerintahan yang terdiri atas 14 (empat belas) Desa dengan jumlah instansi Pemerintah/UPTD sebanyak 3 (tiga) buah (UPTD Dikpora, Kesehatan dan BPP) dan instansi vertikal sebanyak 3 (tiga) buah (Koramil, Polsek dan KUA).

#### Laporan Kependudukan Kecamatan Pulau Hanaut Per 31 Desember Tahun 2018

No.	Kelurahan / Desa	Luas Wilayah Ha.	Jumlah	
			RW	RT
1.	Rawa sari	85.000	05	15
2.	Makarti Jaya	42.000	01	04
3.	Hanaut	66.000	01	22
4.	Bapinang Hulu	37.170	01	02
5.	Bemadu	27,120	05	15
6.	Penyaguan	22,210	04	18

7.	Baibarah	81.000	02	04
8.	Bantian	30.00	01	01
9.	Bapinang Hilir	35.00	01	02
10.	Babaung	30.00	02	05
11.	Bapinang Hilir Laut	14.200	01	04
12.	Hantipan	27,450	02	07
13.	Serambut	45.00	01	06
14.	Satiruk	68,500	01	02

Peta Administrasi Kecamatan Kecamatan Pulau Hanaut



**E. TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA PERENCANAAN STRATEGIS KECAMATAN PULAU HANAUT**

Urusan Pemerintahan Kecamatan Pulau Hanaut Kabupaten Kotawaringin Timur dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, serta Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 54 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Rincian Tugas Pokok, Fungsi Serta Uraian Tugas Kecamatan Kabupaten Kotawaringin Timur.

Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah yang dipimpin oleh seorang Camat dengan tugas pokok melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintah.

Adapun tugas umum Pemerintahan yang dilaksanakan meliputi :

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitasi pelayanan umum;
5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Dalam melaksanakan tugas pokok Camat menyelenggarakan fungsi :

1. Melaksanakan semua pelimpahan kewenangan yang diserahkan oleh Bupati;
2. Melaksanakan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. Melaksanakan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Memberikan pembinaan kepada pemerintahan desa/kelurahan;
6. Melaksanakan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat;
7. Melaksanakan pengawasan pelaksanaan pembangunan secara umum maupun di bidang pendidikan maupun kesehatan di wilayah kecamatan;
8. Memberikan pelayanan administrasi semua perizinan yang dilimpahkan;
9. Memberikan pelayanan administrasi berupa rekomendasi kepada warga masyarakat;
10. Melaksanakan koordinasi di bidang pembangunan pemerintahan dan kemasyarakatan di wilayah kecamatan;
11. Melaksanakan koordinasi dengan unsur muspika, UPTD, atau unit kerja yang ada di wilayah kecamatan;
12. Melaksanakan pembinaan kepada aparatur pemerintah dan warga masyarakat di wilayah kecamatan;
13. Memfasilitasi semua permasalahan yang ada di wilayah kecamatan; dan
14. Melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintah, pembangunan, kemasyarakatan dan ketertiban umum di wilayah kecamatan.

Susunan Organisasi Kecamatan Pulau Hanaut mengacu pada Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 54 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Rincian Tugas Pokok, Fungsi Serta Uraian Tugas Kecamatan, dimana struktur organisasi Kecamatan Pulau Hanaut terdiri dari :

- a. Camat

- b. Sekretariat Kecamatan terdiri dari :
  - 1. Sub Bagian Umum dan Pelaporan
  - 2. Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan
- c. Seksi Tata Pemerintahan
- d. Seksi Pembangunan
- e. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- f. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- g. Seksi Administrasi
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pulau Hanaut merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan sebagai bentuk penjabaran dari Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi yang dimiliki oleh Daerah, dalam hal ini Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pulau Hanaut Tahun 2016-2021 tersebut ditunjukkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2021, selanjutnya Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pulau Hanaut tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pulau Hanaut yang merupakan dokumen perencanaan SOPD untuk periode 1 (satu) tahun, dengan demikian didalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pulau Hanaut memuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada 1 (satu) tahun mendatang.

Visi dan Misi Kecamatan Pulau Hanaut sebagaimana tercantum dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pulau Hanaut Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

#### 1. Visi

**Visi** berkaitan dengan pandangan masa depan, menyangkut kemana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat bekerja secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif (*Lembaga Administrasi Negara, Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*), sebagai bagian dari perencanaan strategi merupakan langkah penting agar dalam hal ini perjalanan suatu organisasi dapat mencerminkan apa yang hendak dicapai sebagai cara untuk memberikan arah dan fokus strategis yang berorientasi terhadap masa depan pembangunan dan menjamin kesinambungan tugas organisasi.

Visi Kabupaten Kotawaringin Timur dirumuskan dengan melihat, menilai dan memberi predikat Kabupaten Kotawaringin yang akan datang, yaitu kondisi ideal Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur yang diinginkan. Visi Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2021 adalah :

**”TERWUJUDNYA MASYARAKAT yang MADANI, DINAMIS, MANDIRI, dan BERDAYA SAING dalam SUASANA RELIGIUS, KEBERSAMAAN, AMAN dan SEJAHTERA”.**

Visi Kecamatan Pulau Hanaut mengikuti Visi Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Renja Kerja (Renja) maupun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Pulau Hanaut Tahun 2019. Diharapkan dengan terumuskannya Visi Kabupaten Kotawaringin Timur dapat menjadi pedoman bagi seluruh Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) dalam merumuskan program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun ke depan.

## 2. Misi

**Misi** adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan (*Lembaga Administrasi Negara, Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*), sebagai bagian rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan, maka Misi Kabupaten Kotawaringin Timur 2016-2021 adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang cerdas, terampil, sehat dan berakhlak.
- b. Mengembangkan penguatan ekonomi masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, pemantapan ketahanan pangan, pengembangan produk unggulan daerah dan pemanfaatan Sumber Daya Alam yang berwawasan lingkungan.
- c. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.
- d. Mengembangkan daya saing daerah melalui usaha perdagangan dan jasa, industri pengolahan, serta pariwisata dan budaya.

Dari 4 (empat) Misi Kabupaten Kotawaringin Timur, Kecamatan Pulau Hanaut melaksanakan Misi ke 3 (tiga) yaitu :

**”MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN yang EFEKTIF dan EFISIEN”.**

Kecamatan Pulau Hanaut melaksanakan Misi tersebut, karena sesuai dengan tugas pokok Camat yaitu melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintah, serta mempunyai fungsi untuk melaksanakan dan memberikan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugas Kecamatan.

## 3. Tujuan dan Sasaran

### a. Tujuan

Tujuan strategis Kecamatan Pulau Hanaut sebagai wujud dari misi guna mewujudkan visi yang mengacu pada tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan suatu masyarakat adil, makmur, merata dan aktual berdasarkan Pancasila dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Adapun tujuan pada Kecamatan Pulau Hanaut yang ingin dicapai Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik yang Prima.

Dengan indikator :

- Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
- Persentase Usulan yang tertampung dalam hasil Musrenbang

2. Meningkatnya Penguatan Pemerintahan Desa/Kelurahan.

Dengan indikator :

- Persentase desa/kelurahan yang telah selesai tata batas
- Persentase desa/kelurahan yang tertib administrasi
- Persentase lembaga perekonomian milik desa/kelurahan
- Jumlah PKK desa/kelurahan yang aktif

3. Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Lingkungan.

Dengan indikator :

- Persentase pelanggaran trantibmas yang ditangani
- Jumlah petugas linmas di kecamatan, desa/kelurahan

4. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Kecamatan.

Dengan indikator :

- Nilai AKIP Kecamatan

**b. Sasaran**

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata. Sesuai dengan tujuan yang diuraikan diatas, maka sasaran yang dicapai dan dituangkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pulau Hanaut periode pembangunan 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang prima.

Dengan indikator sasaran, antara lain :

- a. Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);
- b. Persentase usulan yang tertampung dalam hasil Musrenbang RKPD di Kecamatan.

2. Meningkatnya kualitas pemerintahan desa/kelurahan;

Dengan indikator sasaran, antara lain :

- a. Persentase desa/kelurahan yang telah selesai tata batas;
- b. Persentase desa/kelurahan yang tertib administrasi;
- c. Persentase lembaga perekonomian milik desa/kelurahan;
- d. Jumlah PKK desa/kelurahan aktif.

3. Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban lingkungan;

Dengan indikator sasaran, antara lain :

- a. Persentase pelanggaran trantibmas yang ditangani;
- b. Jumlah petugas linmas di kecamatan dan desa/kelurahan.

4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan.

Dengan indikator sasaran, antara lain :

- a. Nilai AKIP Kecamatan.

Ada 18 (delapan belas) program yang telah ditetapkan guna mendukung pencapaian tujuan sasaran dan strategi Kecamatan Pulau Hanaut Kabupaten Kotawaringin Timur adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
3. Program Peningkatan disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6. Program Penataan Administrasi Kependudukan.
7. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.
8. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi.
9. Program Penataan Daerah Otonomi Baru.
10. Program Pengelolaan Keragaman Budaya.
11. Program Penyelesaian Konflik-konflik pertanahan.
12. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa.
13. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
14. Program Perencanaan Pembangunan Daerah.
15. Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan.
16. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa.
17. Program Pembinaan/Pemberdayaan Remaja, Pemuda, Perempuan dan Olahraga.
18. Program Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.

Kecamatan Pulau Hanaut Tahun 2019 memiliki 18 (delapan belas) program dengan didukung oleh 39 (tiga puluh sembilan) kegiatan yang sinergis dalam pelaksanaan dan terealisasi pada Tahun Anggaran 2019.

## **F. ISU STRATEGIS**

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Pulau Hanaut selama 5 (lima) tahun yang lalu, mencermati tantangan dan peluang pelayanan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pulau Hanaut, maka beberapa permasalahan berdasarkan tugas dan pelayanan yang berkembang dan harus dihadapi Kecamatan Pulau Hanaut, antara lain :

1. Masih terbatasnya jumlah sarana dan prasarana yang ada di Kecamatan, Desa/Kelurahan sehingga pelayanan kepada masyarakat terhambat;
2. Belum optimalnya kompetensi sumber daya aparatur Kecamatan, Desa/Kelurahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing;
3. Tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang prima.

Beberapa permasalahan yang memerlukan pemecahan melalui kebijakan, program dan kegiatan yang bersikap indikatif, yaitu :

1. Pembinaan aparatur/pegawai yang ada di Kecamatan, termasuk juga aparatur di Desa/Kelurahan;
2. Peningkatan peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah;

3. Pembinaan perlindungan masyarakat (linmas) dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang hukum dan ketertiban umum;
4. Peningkatan fasilitasi dan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan Kecamatan, Desa/Kelurahan;
5. Peningkatan fasilitasi dan koordinasi program-program kesejahteraan sosial dari pemerintah.

## **G. SISTEMATIKA PENYAJIAN**

LKIP Kecamatan Pulau Hanaut Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2019 melaporkan pencapaian kinerja selama tahun 2019. Capaian kinerja tahun 2019 diukur dan dinilai berdasarkan Penetapan Kinerja 2019 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Penetapan kinerja sendiri merupakan penjabaran Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pulau Hanaut Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2021.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja Tahun 2019 memungkinkan dilakukannya identifikasi atas sejumlah celah kinerja (*performance gap*) sebagai masukan bagi perbaikan kinerja yang akan datang. Sistematika laporan yang dianjurkan adalah sebagai berikut :

### **BAB I   Pendahuluan**

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

### **BAB II   Perencanaan Kinerja**

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

### **BAB III   Akuntabilitas Kinerja**

#### **a.   Capaian Kinerja Organisasi**

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi dan dilakukan analisis capaian kinerja.

#### **b.   Realisasi Anggaran**

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

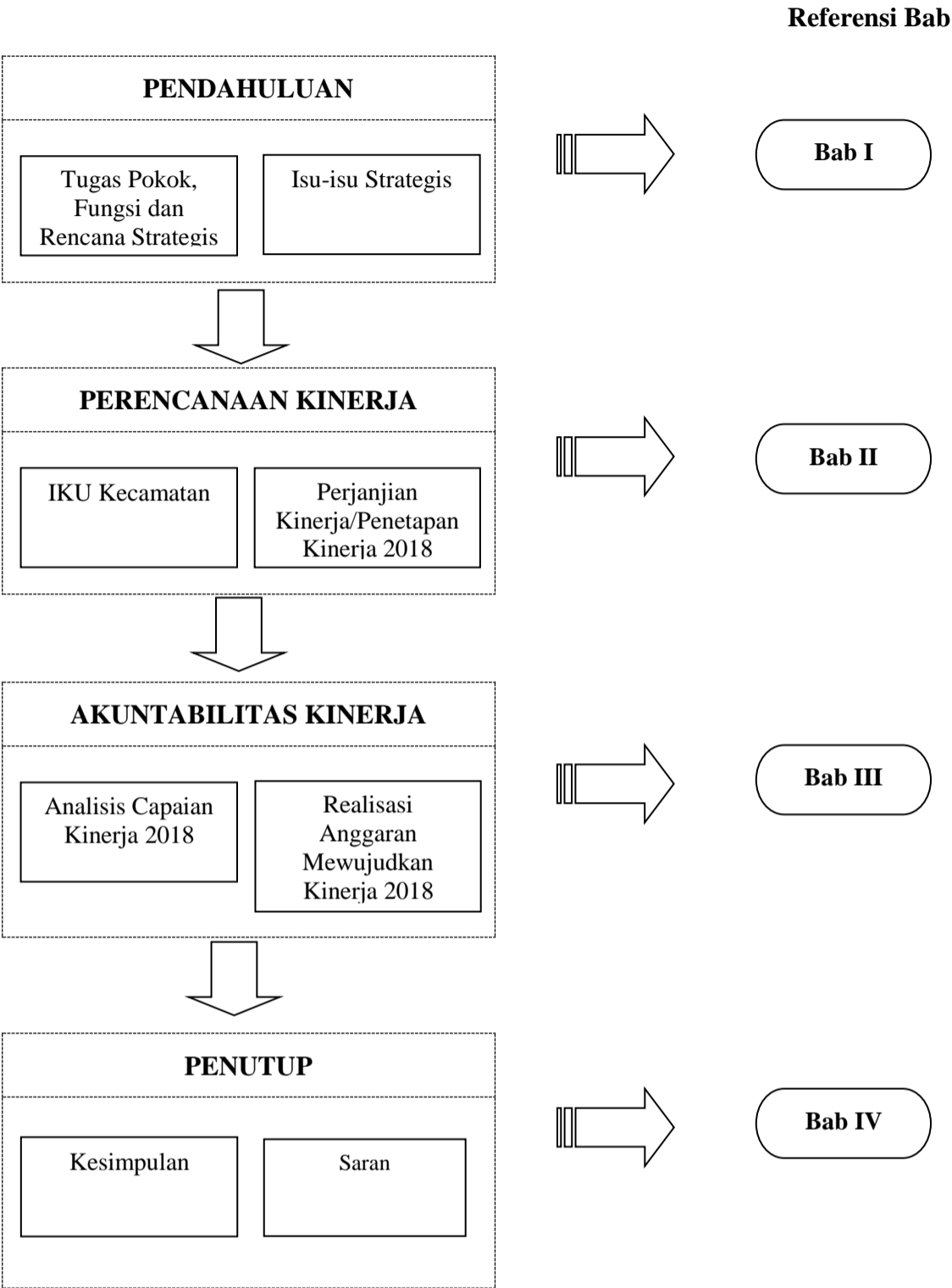
### **BAB IV   Penutup**

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

Dapat di ilustrasikan pada gambar berikut ini :

### **Sistematika Penyajian LKIP Tahun 2019**



**BAB II**  
**PERENCANAAN KINERJA**

Pada penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pulau Hanaut Tahun 2019 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sehubungan dengan peralihan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2010-2015 ke RPJMD Tahun 2016-2021 baru ditandatangani pada bulan Nopember 2016, sedangkan perubahan Nomenklatur SOPD/PD baru ditandatangani pada Desember 2016 (Perda Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur). Disamping itu adanya saran dari evaluator LKIP Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB) RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2021 dan Renstra SOPD agar direvisi/disesuaikan kembali, sebagai dampak penyesuaian tersebut maka Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Kotawaringin Timur dan IKU Perangkat Daerah perlu dilakukan perubahan juga.

Dengan ditetapkannya Perjanjian Kinerja (PK) SOPD di Kabupaten Kotawaringin Timur tanggal 6 Oktober 2018, maka mengakibatkan terjadinya perubahan terhadap semua dokumen Perencanaan Kinerja di Kecamatan Pulau Hanaut, seperti Indikator Kinerja Utama dokumen (IKU) Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019 dan Perjanjian Kinerja (PK) Kecamatan Pulau Hanaut untuk Camat/Kepala SOPD, dan pejabat eselon III (Sekcam) serta Pejabat eselon IV (Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan Lurah) juga ditetapkan pada tanggal 6 Oktober 2018.

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Pulau Hanaut, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kecamatan Pulau Hanaut Tahun 2019, dan Perjanjian Kinerja (PK) Kecamatan Pulau Hanaut Tahun 2019 sebagai berikut :

**A. INDIKATOR KINERJA UTAMA**

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Adapun Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pulau Hanaut sebagaimana tabel 2.1 berikut :

**Tabel 2.1**  
**Indikator Kinerja Utama**  
**Kecamatan Pulau Hanaut**

No.	Indikator Kinerja Utama	Formulasi / Rumus Perhitungan
-----	-------------------------	-------------------------------

1	2	3
1.	Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Hasil survei kepuasan masyarakat (Permenpan 16 Tahun 2014 dan SK Menpan Nomor 25 Tahun 2014)
2.	Persentase usulan yang tertampung dalam hasil Musrenbang RKPD di Kecamatan	Jumlah usulan hasil musrenbang RKPD di Kecamatan Pulau Hanaut dibandingkan dengan Jumlah usulan hasil musrenbang desa yang disampaikan ke Kecamatan Pulau Hanaut dikalikan 100%
3.	Persentase desa/kelurahan yang telah selesai tata batas	Jumlah Desa yang selesai tata batas di Kecamatan Pulau Hanaut dibandingkan dengan Jumlah Desa yang ada di Kecamatan Pulau Hanaut 100%
4.	Persentase desa/kelurahan yang tertib administrasi	Jumlah Desa yang dievaluasi dibandingkan dengan Jumlah Desa yang ada di Kecamatan Pulau Hanaut 100%
5.	Persentase lembaga perekonomian milik desa/kelurahan	Jumlah BUMDesa yang ada di Kecamatan Pulau Hanaut dibandingkan dengan Jumlah Desa yang ada di Kecamatan Pulau Hanaut dikalikan 100%
6.	Jumlah PKK Desa/Kelurahan/Desa	Data jumlah PKK Desa aktif
7.	Persentase pelanggaran trantibmas yang ditangani	Jumlah pelanggaran Keamanan dan Ketertiban yang ditangani dibandingkan dengan Jumlah pelanggaran Keamanan dan Ketertiban yang terjadi di masyarakat dikalikan 100 %
8.	Jumlah petugas linmas di Kecamatan/Kelurahan/Desa	Jumlah petugas Linmas Kecamatan / Desa yang dilatih / dibina
9.	Nilai AKIP Kecamatan	Laporan hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (akip) Kecamatan oleh Inspektorat

## B. RENCANA KINERJA TAHUNAN 2019

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pulau Hanaut Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2021. Rencana Kinerja Tahun ini memuat berbagai indikator kinerja yang berfungsi sebagai parameter atau ukuran yang dapat menunjukkan, menentukan, memberikan, suatu ide atau memberikan dasar untuk mengambil kesimpulan atas sesuatu. Selain itu, indikator mengandung ukuran kuantitatif atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian atas suatu sasaran. Indikator kinerja adalah petunjuk untuk memahami kinerja yang telah dicapai, seperti seberapa baik suatu organisasi atau Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) memenuhi maksud (purpose), kemajuan yang diperoleh dalam mencapai tujuan dan sasaran strategi yang telah ditetapkan. Indikator kinerja dapat menunjukkan efisiensi penggunaan sumber daya yang telah digunakan oleh organisasi atau SOPD. Indikator kinerja adalah ukuran keuangan dan non keuangan dari berbagai aspek yang berbeda dari suatu organisasi atau SOPD. Indikator kinerja merupakan ukuran atas perilaku yang kritis bagi organisasi atau SOPD namun tidak dapat memecahkan masalah. Secara konkrit indikator kinerja tersebut dapat dilihat pada Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019 Kecamatan Pulau Hanaut Kabupaten Kotawaringin Timur di lampiran 2, atau secara ringkas dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut :

**Tabel 2.2**

**Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Pulau Hanaut  
Tahun 2019**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sasaran	Target 2019
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima	1. Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	Baik
		2. Persentase usulan yang tertampung dalam hasil Musrenbang RKPD di Kecamatan	%	100
2.	Meningkatnya kualitas pemerintahan desa	3. Persentase desa/kelurahan yang telah selesai tata batas	%	100
		4. Persentase desa/kelurahan yang tertib administrasi	%	80
		5. Persentase lembaga perekonomian milik desa/kelurahan	%	85
		6. Jumlah PKK Desa/Kelurahan/Desa	Desa	14
3.	Meningkatnya Peningkatan ketentraman keteriban lingkungan	7. Persentase pelanggaran trantibmas yang ditangani	%	80
		8. Jumlah petugas linmas di Kecamatan/Kelurahan/Desa	Orang	80
4.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan	9. Nilai AKIP Kecamatan	Nilai	55

### C. PENETAPAN KINERJA

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokras Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disebutkan bahwa Dokumen Penetapan Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/ kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Dokumen Penetapan Kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja utama organisasi, beserta target kinerja dan anggaran.

Dalam Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja, hendaknya memperhatikan Kontrak Kerja, dokumen perencanaan jangka menengah, dokumen perencanaan tahunan, dokumen penganggaran dan atau pelaksanaan kinerja, dokumen penetapan kinerja dimanfaatkan oleh setiap instansi atau Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) untuk :

1. Memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi;
2. Melaporkan capaian realisasi kinerja dalam laporan kinerja instansi pemerintah;
3. Menilai keberhasilan organisasi

Pada setiap akhir tahun periode, instansi atau SOPD melakukan pengukuran pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja biasanya dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja. Hasil

pengukuran kinerja dilaporkan oleh instansi atau SKPD dalam Laporan Kinerja atau biasa disebut LKIP. LKIP instansi atau SOPD ini disampaikan kepada Bupati, dan LKIP dapat dimanfaatkan untuk:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai,
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Sesuai ketentuan, Perjanjian Kinerja 2019 adalah perjanjian Kinerja Kecamatan Pulau Hanaut 2019 yang disusun berdasarkan pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pulau Hanaut tahun 2016-2021, Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pulau Hanaut Tahun 2019 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2019.

Perjanjian Kinerja Kecamatan Pulau Hanaut meliputi 4 (empat) sasaran strategis, yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima
2. Meningkatnya kualitas pemerintahan Desa/Kelurahan
3. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban lingkungan
4. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Kecamatan

Perjanjian Kinerja Kecamatan Pulau Hanaut Tahun 2019, secara garis besar dapat dilihat pada Tabel berikut :

**Tabel 2.3**  
**Penetapan Kinerja Kecamatan Pulau Hanaut**  
**Tahun 2019**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2019	Program	Anggaran	Ket
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima.	1.Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik	1 Program pelayanan administrasi perkantoran	802.480.2000	APBD
				2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1.586.501.360	APBD
				3 Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur	40.900.0000	APBD
				4 Program penataan administrasi kependudukan		APBD
				5 Program Penataan Daerah otonomi baru	600.727.000	APBD
		2.Persentase usulan yang tertampung dalam hasil Musrenbang RKPD di Kecamatan	100	1 Program perencanaan pembangunan daerah		APBD
2.	Meningkatnya kualitas pemerintahan desa	3.Persentase desa/kelurahan yang telah selesai tata batas	100	- Sudah dilaksanakan	-	-
		4.Persentase desa/kelurahan yang tertib administrasi	80	1 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	-	APBD
				2 Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	-	APBD
		5.Persentase lembaga perekonomian milik desa	75	1 Program Peningkatan Promosi dan	14.715.440	APBD

		6.Jumlah PKK Desa/Kelurahan/Desa	7	Investasi 2 Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan	48.240.000	APBD
3.	Meningkatnya ketentraman ketertarikan lingkungan	7.Persentase pelanggaran trantibmas yang ditangani	80	1 Program Pengendalian Kebakaran Hutan	8.000.000	APBD
				2 Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan		APBD
				3 Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan		APBD
		8. Jumlah petugas linmas di Kecamatan/Kelurahan/Desa	45	1. Program Peningkatan Disiplin Aparatur		APBD
				2. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan		APBD
4.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan	9.Nilai AKIP Kecamatan	55	1. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		APBD

Jumlah anggaran yang dikelola Kecamatan Pulau Hanaut Pada Tahun 2019 sebesar Rp.3.1,- dengan realisasi sebesar Rp.3.092.762.660,- sedangkan rincian Belanja Tidak Langsung Rp.3.123.022.000 dengan realisasi sebesar Rp.2.908.192.655,- dan Belanja Langsung Rp.1.773.819.650,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.609.145.850,- Sedangkan belanja yang berkaitan dengan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja sasaran tahun 2019 Rp. 1.701.424.550,-

Perjanjian Kinerja Kecamatan Pulau Hanaut Tahun 2019, Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Pulau Hanaut, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019 dan Pengukuran Kinerja Tahun 2019 secara rinci dapat dilihat pada lampiran 1,2,3, dan 4.

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan

misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.sebagai suatu entitas organisasi Kecamatan Pulau Hanaut sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah telah melaksanakan kewajiban akuntabilitas melauai penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pulau Hanaut.

**A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

Pengukuran capaian kinerja digunakan sebagai dasar penilaian atas keberhasilan (kegagalan) pelaksanaan kegiatan/program/kebijaksanaan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Sebagai langkah awal dalam melakukan pengukuran capaian kinerja, perlu ditetapkan indikator kinerja dan capaian kinerja. Dari hasil tersebut kemudian dilakukan evaluasi kinerja dengan cara menghitung nilai rata-rata capaian kinerja dari pelaksanaan kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pengukuran capaian kinerja Pemerintah Kecamatan Pulau Hanaut digunakan sebagai dasar penilaian atas keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan/program/kebijaksanaan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2019 dalam rangka mewujudkan Misi dan Visi Pemerintah Kecamatan Pulau Hanaut.

Secara keseluruhan hampir sebagian besar sasaran strategis berikut indikator. Terhadap program, kegiatan, sasaran maupun target indikator kinerja dapat diwujudkan oleh Pemerintah Kecamatan Pulau Hanaut.

**Tabel 3.1**  
**Kategori Pencapaian Kinerja**

Urutan	Rentang Capaian	Katagori Capaian
I	> 100 %	Sangat Berhasil
II	91 % sampai 100 %	Berhasil
III	81 % sampai 90 %	Cukup Berhasil
IV	< 81 %	Kurang Berhasil

Sesuai dengan dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2019, Pemerintah Kecamatan Pulau Hanaut Kabupaten Kotawaringin Timur memiliki 4 (Empat) sasaran strategis dan 9 (sembilan) indikator sasaran (Kinerja output) yang harus dilaksanakan.

Adapun pencapaian kinerja sasaran Kecamatan Pulau Hanaut Kabupaten Kotawaringin Timur pada Tahun 2019,dapat dilihat padaTabel 3.2 Berikut:

**Tabel 3.2**  
**Persentase Kategori Pencapaian Indikator Sasaran**

No.	Kategori Capaian Sasaran Strategis	Capaian
1	2	3
1.	Baik Sekali	-
2.	Baik	100 %
3.	Cukup	-
4.	Kurang	-

Dari 4 (empat) sasaran diatas,pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan,sebagai berikut:

**Tabel 3.3.**  
**Pencapaian Target Sasaran Tahun 2019**

No.	Sasaran	Jumlah Indikator Sasaran	Tingkat Pencapaian							
			Baik Sekali		Baik		Cukup		Kurang	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Sasaran 1	2	-	-	2	100	-	-	-	-
2.	Sasaran 2	4	-	-	4	100	-	-	-	-
3.	Sasaran 3	2	-	-	2	100	-	-	-	-
4.	Sasaran 4	1	-	-	1	100	-	-	-	-
Jumlah		9	-	-	9	100	-	-	-	-

Hasil analisis pencapaian indikator sasaran terdapat 4 (Empat) sasaran yang mencakup 9 (sembilan) indikator kinerja sasaran,diketahui bahwa 4 (empat) indikator atau 100 % baik. Dari sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan tersebut, secara keseluruhan tingkat capaian kinerja Pemerintah Kecamatan Pulau Hanaut adalah ” **Berhasil**” dengan nilai **98 %**.

**B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA KECAMATAN PULAU HANAUT TAHUN 2019**

Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai didapat dengan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran. Hasil Pengukuran dan pencapaian Kinerja sasaran Kecamatan Pulau Hanaut Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2019 dapat dilihat pada Lampiran 5.

Adapun pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada Tahun 2019 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari 4 (empat) sasaran dan 9 (sembilan) indikator kinerja sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Pulau Hanaut KabupatenKotawaringin Timur Tahun 2016-2021, analisis capaian kinerja pada Pemerintah Kecamatan Pulau Hanaut dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci sebagai berikut:

1	<b>Sasaran :</b> <b><i>Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik yang Prima</i></b>
---	--

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran “**Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik yang Prima**” didalam menyelenggarakan Organisasi Kecamatan” diukur melalui 2 (Dua) indikator.

Adapun Indikator kinerja Sasaran tersebut berikut target dan realisasi disajikan pada tabel 3.4 berikut:

**Tabel 3.4**  
**Analisis Pencapaian Sasaran 1 “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Tahun 2019 dan Perbandingan dengan Target Akhir Rensta Tahun 2021**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019		Capaian	Tahun 2021	Capaian (%)
			Target	Realisasi		Target	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	Baik	Baik	100	Baik	100
2.	Persentase usulan yang tertampung dalam hasil Musrenbang RKPD di Kecamatan	%	100	100	100	100	100
Rata-rata Capaian Kinerja					100		100

Sasaran meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dapat diukur melalui 2 (dua) indikator yang diperjanjikan yaitu Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM),dan Prosentase usulan yang tertampung dalam hasil Musrenbang RKPD di Kecamatan Pulau Hanaut untuk Kecamatan Pulau Hanaut Indikator Rata-rata Indeks Kepuasan telah dilakukan melalui angket yang disebarkan sebanyak 150 responden.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja sasaran dalam “Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik yang Prima” adalah sebesar 100 % yang berarti masuk dalam katagori berhasil.

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2018 dan tahun 2019 disajikan padatabel 3.5 berikut:

**Tabel 3.5**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 1**  
**2018 dan 2019**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018	Tahun 2019
1	2	3	4	5
1.	Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	Belum dilaksanakan	Baik
2.	Persentase usulan yang tertampung dalam hasil musrenbang RKPD	%	100	100

	diKecamatan			
--	-------------	--	--	--

### 1. Pencapaian Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Capaian kinerja Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat yang dilakukan melalui Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Pelayanan Publik di Kecamatan Pulau Hanaut seperti program PATEN melalui Sekretariat Kecamatan dan Seksi Administrasi pada Tahun 2019 telah dilakukan melalui komponen Survey yaitu kuisioner dengan melibatkan syarat minimal 150 Responden dengan Unsur-unsur pelayanan dalam survey terdiri antara lain: Prosedur Pelayanan, Pesyaratan Pelayanan, Kejelasan Petugas Pelayanan, Kedisiplinan Petugas Pelayanan, Tanggung jawab petuga pelayanan, kemampuan petugas pelayanan dan kecepatan pelayanan, Keadilan mendapatkan pelayanan, kesopanan dan keramahan petugas, kewajaran biaya pelayanan, kepastian jadwal pelayanan, kenyamanan lingkungan, keamanan pelayanan dan menampung adanya saran atau kritik dari masyarakat.

Kegiatan pelayanan publik dapat dilaksanakan seperti Pelayanan PATEN contohnya Register Pembuatan Kartu Keluarga, Register Pembuatan E-KTP, Register surat keterangan domisili, Register surat keterangan pindah datang WNI, Register surat keterangan tidak mampu, Register surat keterangan, Rekomendasi pernikahan, Surat izin usaha mikro dan kecil, Izin mendirikan bangunan, Surat izin tempat usaha, Izin reklame.

Kegiatan Survey tentang kepuasan masyarakat telah dilakukan pada Tahun 2018 akan tetapi terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan antara lain:

- Kondisi/letak geografis Kecamatan Pulau Hanaut dimana 3 (tiga) Desa yang susah jalan daratnya sehingga untuk urusan administrasi ke tiga desa tersebut lebih memakan waktu dibandingkan ke desa yang lain.
- Survey kepuasan masyarakat masih dilakukan di kantor Kecamatan Pulau Hanaut belum ke desa-desa yang ada di wilayah Kecamatan Pulau Hanaut.

Adapun Program/Kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran tersebut adalah :

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Output dari program beserta kegiatan-kegiatan didalamnya adalah tersedianya belanja jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan internet, jasa kebersihan kantor, jasa peralatan dan perlengkapan kantor, bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, makanan dan minuman kegiatan/rapat, dan terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar dan dalam daerah dan tujuannya untuk pendukung pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat.

Dengan pagu Anggaran sebesar Rp. 802.480.200,- dan realisasi sebesar Rp. 800.664.427,- dan penyerapan anggaran sebesar 99,77 %

- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Output dari program beserta kegiatan-kegiatan didalamnya tersedianya pembangunan gedung baru, Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor, Pengadaan Peralatan Gedung Kantor dan

tersediannya pemeliharaan terhadap gedung kantor, Tersediannya pemeliharaan kendaraan dinas operasional, tersediannya pemeliharaan perlengkapan dan peralatan kantor.

Dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.586.501.360,- dan realisasi sebesar Rp.1.389.468.804,- dengan penyerapannya sebesar 87,58 %

c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Output dari program dan kegiatan didalamnya adalah terlaksanya peningkatan kapasitas/pengetahuan pegawai kecamatan guna peningkatan pelayanan terhadap masyarakat

Serta Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang desa Dengan pagu anggaran Rp. 40.900.000,- realisasi kegiatan tersebut sebesar Rp. 40.900.000.- atau dengan penyerapan anggaran sebesar 100 %

d. Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Penyelengraan Festival Habaring Hurung yang diadakan di Kabupaten Dengan pagu Rp. 5.000.000,- realisasi sebesar Rp. 5.000.000,- dengan penyerapan anggaran sebesar 100%

e. Program Penataan Daerah otonomi Baru

Output dari program kegiatan ini adalah Jumlah Persentase pelaksanaan kegiatan keagamaan, kemasyarakatan dan hari-hari besar Nasional dan Daerah dengan pagu Rp.159.280.000,-realisasi sebesar Rp.158.767.000,-dengan penyerapan anggaran sebesar 99,68 %.

Untuk lebih terperinci mengenai program dan kegiatan yang mendukung tercapainya indikator Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dapat dilihat pada tabel 3.6 berikut:

**Tabel 3.6**  
**Program/kegiatan penunjang Pencapaian Indikator Kinerja**  
**Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**  
**Tahun 2019**

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/kegiatan	Kinerja				Keuangan		
			Satuan	Target	Realisasi	capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah pelayanan administrasi kantor yang tersedia selama setahun sesuai dengan kebutuhan	%	100	100	100%	681.021.160	672.678.688	98,78 %
	Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang dilayani dalam setahun	Lembar	820	820	100 %	3.720.000	3.720.000	100 %
	Kegiatan penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air,listrik dan internet	Jumlah rekening yang dibayar	Jumlah	3	3	100%	27.642.600	25.631.956	92,73 %
	Kegiatan Penyediaan Jasa Peratan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan da Perlengkapan Kantor	Bidang	1	1	100 %	3.000.000	2.980.000	99,33 %
	Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah tenaga atau Hnoraryum yang dibayarkan untuk mendukung kinerja	Orang	17	17	100 %	253.854.865	251.002.450	98,88 %
	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Persentase kelengkapan peralatan kebersihan dan tenaga kebersihan	%	100	100	100 %	30.565.695	30.505.350	99,80 %
	Kegiatan Penyediaan Alat	Persentase Penyediaan Alat	%	100	100	100 %	17.155.000	17.155.000	100 %

LKIP Kecamatan Pulau Hanaut Tahun Anggaran 2019

	Tulis Kantor	Tulis Kantor							
	Kegiatan Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Jumlah cetak dan Pengandaan yang terealisasi	Lembar	46.675	46.675	100 %	15.730.000	15.700.000	99,81%
	Kegiatan Penyediaan komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	Persentase Penyediaan Komponen listrik	%	100	100	100%	3.858.000	3.854.550	99,91 %
	Kegiatan Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah rekening Koran/bahan bacaan selama 1 Tahun	Jumlah	1095	888	81 %	5.475.000	4.440.000	81,10 %
	Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Penyediaan Bahan Logistik Kantor	%	100	100	100 %	7.800.000	7.727.643	99,07 %
	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Persentase Penyediaan Makanan dan Minuman	%	100	100	100 %	43.100.000	43.002.000	99,77 %
	Kegiatan Rapat-rapat konsultasi dan koordinasi ke luar daerah	Jumlah Pegawai yang melakukan study dan pembelajaran ke luar daerah	Jumlah	100	100	100 %	159.720.000	157.659.739	98,71 %
	Kegiatan Rapat-rapat konsultasi dan koordinasi ke dalam dareah	Persentase Jumlah pegawai mengikuti rapat dan koordinasi ditingakt desa,kecamatan dan kabupaten	%	100	100	100 %	109.400.000	109.300.000	99,91 %
2.	Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan (%) aparatur yang dilayani sarana dan prasarana memadai	%	90 %	85 %	85 %	1.586.501.360	1.389.468.804	87,58 %
	KegiatanPembangunan Gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang di bangun dalam 2 (dua) tahun	Jumlah	2 Buah/unit	2 Buah/unit	100 %	1.458.750.000	1.2.63.289.000	96,17
	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung kantor yang di bangun dalam 2 (dua) tahun	Jumlah	2 Buah/unit	2 Buah/unit	100 %	2.700..000	2.676.000	99,11
	Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan gedung kantor yang di bangun dalam 1 (satu) tahun	Jumlah	6 Buah/unit	6 Buah/unit	100 %	39.010.984	38.970.334	99,90
	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	Jumlah	2 Buah/unit	2 Buah/unit	100%	30.550.000	29.884.810	99,63
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Jumlah	1 Unit	1 Unit	100%	15.524.000	14.811.160	95,41
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Aparatur/pegawai yang mengikuti bimtek dan diklat dalam maupun luardaerah	Jumlah	9	9	99 %	40.900.000	40.900.000	100.00
	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Aparatur/pegawaiyang mengikuti bimtek dan diklat	Jumlah	9	8	88 %	40.900.000	40.900.000	100.00
4.	Prorgam Penataan Administrasi Kependudukan	Jumlah Persentase Perekaman e-KTP dikecamatan	%	95	95	100 %	-	-	-
	KegiatanPembentukan dan Penataan SistemKoneksi(NIK)	Jumlah Persentase Perekaman e-KTP dikecamatan	%	95	95	100 %	-	-	-
5.	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Jumlah Persentase pelaksanaan kegiatan keagamaan, kemasyarakatan dan hari-hari besar Nasional dan Daerah	%	95	95	100	600.725.000	585.588.444	98.15

2. Pencapaian Usulan yang tertampung dalam hasil musrenbang RKPD di Kecamatan

Capaian Kinerja indikator usulan yang tertampung dalam hasil musrenbang RKPD di Kecamatan Pulau Hanaut adalah sebesar 100% dari target sebesar 100 % yang direncanakan dalam perjanjian kinerja tahun 2019, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100 % atau mencapai terget yang diperjanjikan.

Tahun 2019 merupakan Tahun ketiga Renstra, capaian Tahun 2019 sebesar 100 % bila dibandingkan dengan target akhir Renstra Tahun 2021 yaitu 100 %, maka capaian kinerjanya mencapai 100 %

Selain itu juga mengenai perbandingan realisasi kinerja sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 disajikan pada tabel 3.7 berikut :

Tabel 3.7

No	Indikator Kinerja	Kinerja	Satuan	Tahun 2018	Tahun 2019
1.	Persentase usulan yang tertampung dalam hasil Musrenbang RKPD di Kecamatan	Realisasi	%	100	100
		Capaian	%	100	100

Sedangkan realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2019 sebesar 100 % bila dibandingkan dengan target pada Renstra Kecamatan Pulau Hanaut Tahun 2021 yaitu 100 maka capaian kinerjanya mencapai 100%.

Data penunjang capaian kinerja indikator usulan yang tertampung dalam hasil musrenbang RKPD di Kecamatan Pulau Hanaut yang diperoleh dari Kepala Seksi Pembangunan berasal dari Musrenbang Desa dan Musrebang RKPD di Kecamatan Pulau Hanaut dapat dilihat pada Tabel 3.8 berikut:

Tabel 3.8  
Data Usulan Musrenbang Kelurahan/Desa yang tertampung pada Musrenbang RKPD di Kecamatan

No.	Desa	Jumlah Usulan pada Musrenbang Kelurahan/Desa	Usulan pada musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan Pulau Hanaut		
			Usulan yang tertampung/Prioritas	Usulan Yang tidak disepakati	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1.	Bagendang Hulu	20	20	5	25
2.	Bagendang permai	19	19	1	20
3.	Bagendang Hilir	58	58	2	60
4.	Bagendang Tengah	6	6	5	11
5.	Sumber makmur	10	10	9	19
6.	Natai Baru	30	30		30
7.	Pondok damar	8	8	4	12
Jumlah		151	151	26	177

Usulan yang disampaikan oleh desa merupakan usulan yang menjadi prioritas desa tersebut untuk tahun 2019 .Semua usulan tersebut semuanya di rekapitulasi sebagai usulan Kecamatan Pulau Hanaut dalam Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan dengan perhitungan sebagai berikut:

Usulan yang tertampung dalam hasil = Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan

=

Jumlah usulan hasil Musrenbang Desa/Kelurahan yang tertampung

Jumlah usulan hasil Musrenbang Desa/Kelurahan yang disampaikan ke Kecamatan

$$\frac{151}{151} \times 100\% = 100\%$$

Program pendukung capaian indikator usulan yang tertampung dalam hasil musrenbang RKPD di Kecamatan Pulau Hanaut, adalah Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 8.700.000 dan realisasi sebesar Rp. 8.700.000 atau penyerapannya sebesar 100 %

Untuk lebih terperinci mengenai program dan kegiatan yang mendukung tercapainya indikator Usulan yang tertampung dalam hasil Musrenbang RKPD di Kecamatan Pulau Hanaut dapat dilihat dalam tabel 3.9

**Tabel 3.9**  
**Program/Kegiatan Penunjang Pencapaian Indikator Kinerja Usulan yang tertampung dalam Hasil Musrenbang RKPD diKecamatan Tahun 2019**

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Kinerja				Keuangan		
			Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Usulan yang tertampung dalam hasil musrenbang RKPD di Kecamatan	Persentase	100	100	100 %	8.700.000	8.700.000	100 %
	Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Persentase Peserta yang menghadiri kegiatan Musrenbang RKPD Di Kecamatan	Persentase	100	100	100 %	8.700.000	8.700.000	100 %

2

Sasaran :

Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Desa/Kelurahan

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran terhadap “Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Desa/Kelurahan” dapat diukur melalui 4 (Empat) indikator.

Adapun Indikator kinerja Sasaran tersebut berikut target dan realisasi disajikan pada tabel 3.10 berikut:

**Tabel 3.10**

**Analisis Pencapaian Sasaran 2**  
**Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Desa Tahun 2019**  
**Dan Perbandingan dengan Target Akhir Renstra Tahun 2021**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019		Capaian (%)	Tahun 2021	Capaian %
			Target	Realisasi		Target	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Persentase Desa/Kelurahan yang telah selesai tata batas	%	100	100	100	100	100
2.	Persentase Desa/Kelurahan yang tertib administrasi	%	80	80	100	97	97
3.	Persentase Lembaga Perekonomian Milik Desa	%	75	75	100	90	90
4.	Jumlah PKK Desa/Kelurahan aktif	Desa	7	6	85	7	7
Capaian Sasaran					96,25		100

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja sasaran terhadap **“Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Desa/Kelurahan”** adalah sebesar **96,25 %** yang berarti masuk dalam katagori capaian **Berhasil**.

Sasaran meningkatnya kualitas Pemerintahan Desa/Kelurahan dapat diukur dengan 4 (empat) indikator yang diperjanjikan yaitu:

**1. Capaian Desa/Kelurahan yang telah selesai tata batas**

Capaian Kinerja indikator Desa yang telah selesai tata batas di Kecamatan Menta ya Hilir Utara adalah sebesar 100 % dari target sebesar 100 % yang direncanakan dalam perjanjian kinerja tahun 2019, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100 % atau mencapai terget yang diperjanjikan

Pada Tahun 2016 kegiatan Tapal batas desa telah selesai dilaksanakan sehingga Target Renstra sampai tahun 2021 telah selesai dilaksanakan pada Tahun 2016 melalui pemasangan konstruksi Pilar Batas Utama (PBU) dan Pilar Batas Antara (PBA) yang merupakan tugu batas antar desa yang ada di wilayah Kecamatan Pulau Hanaut serta terbitnya Peta Tapal Batas Desadan Kecamatan dari Kabupaten Kotawaringin Timur untuk Kecamatan Pulau Hanaut.sehingga tidak ada program dan kegiatan yang mendukung capaian kinerja indikator ini karena telah selesai dilaksabakan pada Tahun 2016.

Selain itu juga mengenai perbandingan **realisasi kinerja** sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 disajikan pada tabel 3.11 berikut :

Tabel 3.11

No	Indikator Kinerja	Kinerja	Satuan	Tahun 2018	Tahun 2019
1.	Jumlah Desa/Kelurahan yang telah selesai tata batas	Realisasi	%	100	100
		Capaian	%	100	100

Sedangkan realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2019 sebesar 100 % bila dibandingkan dengan target pada Renstra Kecamatan Pulau Hanaut Tahun 2019 yaitu 100 % maka capaian kinerjanya mencapai 100%.

2. Pencapaian Desa/Kelurahan tertib Administrasi

Capaian Kinerja indikator persentase desa yang tertib administrasi adalah sebesar 80 % dari target 80 % yang direncanakan dalam perjanjian kinerja 2019, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100 % atau mencapai target yang diperjanjikan.

Tahun 2019 merupakan Tahun ketiga Renstra, capaian tahun 2019 adalah 100 % bila dibandingkan dengan target akhir renstra Kecamatan Pulau Hanaut Tahun 2021 yaitu 100 maka capaian kinerjanya.

Semua desa di Kecamatan Pulau Hanaut telah di evaluasi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dengan Perhitungan sebagai berikut

Persentase Desa/ Kelurahan tertib Administrasi = 
$$\frac{\text{Jumlah Desa/Kelurahan yang dievaluasi}}{\text{Jumlah Desa/Kelurahan yang ada di Kecamatan}} \times 100 \%$$

= 
$$\frac{7}{7} \times 100\% = 100 \%$$

Data Pendukung capaian kinerja indikator persentase Desa yang tertib administrasi diperoleh dari Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kecamatan Pulau Hanaut. Penilaian Desa/Kelurahan tertib administrasi yaitu melalui pelaksanaan evaluasi perkembangan Desa, sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan. Program tersebut telah dilaksanakan oleh Kecamatan Pulau Hanaut dan pada Tahun 2019 dibentuk tim Penetapan Tim Penilai dan Pembinaan Perkembangan Desa dan Kelurahan yang dituangkan dalam Surat Keputusan Camat dan telah dilaksanakannya lomba desa tingkat Kecamatan Pulau Hanaut pada Tahun 2019 ini. Adapun upaya-upaya yang dilakukan agar desa lebih tertib administrasi dan aktif antara lain:

- Melakukan pembinaan secara berkala terhadap desa-desa untuk lebih tertib dan taat administrasi melalui kegiatan sosialisasi pengelolaan keuangan desa dan sosialisasi SOTK Pemdes (susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah desa)

- Telah dilakukan Perlombaan Desa yang dilaksanakan di Desa Bapinang Hulu yang didalamnya terdapat beberapa kriteria dalam lomba desa meliputi beberapa bidang antara lain: data profil desa,potensi dan tingkat perkembangan desa dalam 2 tahun terakhir, pemberdayaan bidang pendidikan, pemberdayaan bidang kesehatan,pemberdayaan bidang keamanan dan ketertiban,bidang pemerintahan, bidang ekonomi masyarakat,serta pemberdayaan kesejahteraan keluarga.

Program yang mendukung capaian kinerja indikator Persentase Desa/Kelurahan yang tertib administrasi,adalah sebagai berikut:

- Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa  
Output dari program beserta kegiatan-kegiatan didalamnya adalah terlaksananya kegiatan evaluasi perkembangan desa/Kelurahan dan mengetahui skor/nilai Desa/Kelurahan  
Dengan Pagu anggaran sebesar Rp.0,-dan realisasi sebesar Rp.0,-  
Penyerapan anggaran sebesar 0%
- Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa  
Output dari program beserta kegiatan-kegiatan didalamnya terlaksananya Evaluasi Rancangan Peraturan APBDes  
Dengan Pagu anggaran sebesar Rp.0 dan realisasi Rp.0,-atau penyerapannya sebesar 0 % kendala dalam pelaksanaan program ini sehingga penyerapan anggarannya rendah dikarenakan Honor Pelaksanaan Kegiatan Tim Evaluasi dan Monotoring dana desa selama Tahun 2019 tidak bisa dicairkan karena menjadi perhatian BPK RI berkaitan dengan Honor-honor Pelaksana Kegiatan yang tertuang dalam SK Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2019 tidak menyebutkan pasal tentang pembayaran honor tim pelaksana kegiatan evaluasi dan monitoring dana desa.

Untuk lebih terperinci mengenai program dan kegiatan yang mendukung tercapainya indikator persentase Desa/Kelurahan yang tertib administrasi tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel.3.12**  
**program dan kegiatan yang mendukung tercapainya indikator persenrase Desa/Kelurahan yangtertib administrasi tahun 2019**

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Kinerja				Keuangan		
			Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa	Persentase Peningkatan Perkembangan Status desa/kelurahan	%	95	95	100 %			81,82 %
	Kegiatan evaluasi	Jumlah DesaYang	Jumlah	14	14	100 %			100 %

	pengembangan desa/kelurahan	dievaluasi							
2.	Prorgam Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Persentase Aparatur Desa yang ikut dalam evaluasi Perdes	%	95	95	100 %			100 %
	Kegiatan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes	Jumlah Desa/Perdes yang dievaluasi dalam evaluasi Perdes	%	14	14	100 %			100 %

3. Pencapaian Lembaga Perekonomian Milik Desa

Capaian Kinerja indikator persentase Lembaga Perekonomian Milik Desa adalah sebesar 85 % dari target sebesar 85 % yang direncanakan dalam perjanjian kinerja 2019, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100 % atau mencapai target yang diperjanjikan.

Data pendukung capaian kinerja indikator persentase Lembaga Perekonomian milik Desa diperoleh dari Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kecamatan Pulau Hanaut.

Untuk Lembaga Perekonomian desa atau sebutan Badan Usaha Milik Desa atau Bumdes, maka Lembaga Perekonomian milik desa dikecamatan Pulau Hanaut terdapat 14 (tujuh) Bumdes Desa dan gabungan dari Bumdes 14 desa di Kecamatan yang sekarang telah membentuk mini market dengan nama Bapinang Jaya Mart yang merupakan Bumdes bersama 14 Desa di Kecamatan Pulau Hanaut yang menjual beberapa kebutuhan pokok masyarakat.

Dengan Perhitungan sebagai berikut:

Persentase Lembaga Perekonomian Milik Desa = 
$$\frac{\text{Jumlah BUMDES yang ada diKecamatan}}{\text{Jumlah Desa yang ada di Kecamatan}} \times 100 \%$$

$$= \frac{14}{14} \times 100\% = 100 \%$$

Program pendukung capaian indikator persentase Lembaga Perekonomian milik Desa, adalah Program Peningkatan Promosi dan Investasi Daerah dengan kegiatan pelaksanaan Sampit Expo dengan pagu anggaran Rp. 14.715.440,- dan realisasi sebesar Rp. 14.715.440,- atau penyerapan anggaran sebesar 100%

Untuk lebih terperinci mengenai program dan kegiatan yang mendukung tercapainya indikator persentase Lembaga Perekonomian milik Desa, dapat dilihat pada tabel 3.13 berikut:

Tabel 3.13  
program dan kegiatan yang mendukung tercapainya indikator persentase Lembaga Perekonomian milik Desa

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Kinerja				Keuangan		
			Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Program Peningkatan Promosi dan Investasi Daerah	Persentase Peningkatan produk unggulan kecamatan yang dipromosikan	%	99	99	100 %	14.715.440	14.715.440	100 %
	Kegiatan Pelaksanaan Sampit Expo	Jumlah jenis belanja yang mendukung kegiatan sampitexpo	Jumlah	5	5	100 %	14.715.440	14.715.440	100%

4. Pencapaian Jumlah PKK Desa/Kelurahan Aktif

Capaian kinerja indikator PKK Desa/Kelurahan Aktif adalah sebesar 9 Desa dari 14 Desa yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja 2019, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 85 % atau mencapai target yang diperjanjikan.

Data penunjang capaian kinerja indikator PKK Desa/Kelurahan Aktif yang diperoleh dari Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kecamatan Pulau Hanaut. Adapun hasil penilaian PKK Desa/Kelurahan yang aktif/tidak aktif, sebagaimana table 3.14 berikut :

Tabel 3.14  
Data PKK Desa/Kelurahan di Kecamatan Pulau Hanaut

No .	Kriteria Aktif	PKK Kelurahan/Desa								
		Desa Bapinang Hilir	Desa Penyaguan	Desa Bapinang Hulu	Desa Hanaut	Desa Makarti Jaya	Desa Rawa Sari	Desa Bamadu	Desa Babirah	Desa Bebau ng
1	2	3	4	5	6	7	8			
1	Memiliki Surat Keputusan (SK) Kepengurusan PKK Kelurahan/Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2	Pertemuan Rutin Bulanan	√	√	√	√	√	√	√	√	√
3	Kepengurusan/keanggotaan lengkap sesuai ketentuan	√	√	√	√	√	√	√	√	√
4	Kegiatan PKK Berjalan (Posyandu)	√	√	√	√	√	√	√	√	√

Berdasarkan tabel 3.17 tersebut diatas, maka dapat disimpulkan PKK Desa/Kelurahan yang ada di Kecamatan Pulau Hanaut berjumlah 14 (empat belas) PKK Desa/Kelurahan , dari 4 (empat) indikator yang ditetapkan untuk mengetahui aktif/tidaknya PKK Desa/Kelurahan, maka dapat diketahui bahwa terdapat 9 (sembilan) PKK Desa/Kelurahan yang aktif atau semua PKK Desa/Kelurahan yang ada di Kecamatan Pulau Hanaut aktif sebesar (85%).

Berdasarkan data diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa semua PKK Desa/Kelurahan yang ada di Kecamatan Pulau Hanaut dapat dikategorikan aktif sebesar 85%. Walaupun masih terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan perbaikan, seperti perlu adanya peningkatan pengetahuan/pemahaman pengurus dan anggota PKK Desa/Kelurahan terhadap 10 (sepuluh) pokok program PKK dan berkaitan dengan kelengkapan kebun TOGA PKK.

Solusi yang dapat dilakukan yaitu dengan mengintensifkan pembinaan PKK Kecamatan terhadap PKK Desa/Kelurahan, serta melakukan kegiatan sosialisasi program pokok PKK atau pengembangan kreativitas anggota PKK Desa/Kelurahan dengan mengundang PKK Kabupaten atau nara sumber lain. Untuk Tahun 2019 PKK Kecamatan dan PKK desa mulai aktif melakukan kegiatan-kegiatan antara lain: telah mengikuti jambore PKK di Kabupaten yang didalamnya terdapat lomba-lomba seperti Lomba Penyuluhan, Lomba yel-yel PKK, Lomba pidato dan Lomba Fashion Show, Lomba daur ulang sampah serta telah dilakukan pembinaan PKK Kabupaten ke PKK desa Sumber Makmur dengan kegiatan sosialisasi tentang 4 Pokja dan kegiatan senam lansia.

Program pendukung capaian indikator persentase PKK Desa/Kelurahan Aktif adalah Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan dengan kegiatan Pembinaan PKK Kecamatan/Kelurahan/Desa, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 48.340.000,- dan dengan realisasi sebesar Rp. 48.230.300,- atau penyerapan anggaran sebesar 99,98 %. Walaupun realisasi penyerapan anggaran sangat rendah, akan tetapi tujuan pembinaan PKK Desa/Kelurahan tercapai, sehingga didapatkan hasil semua PKK Desa/Kelurahan di Kecamatan Pulau Hanaut aktif.

Untuk lebih terperinci mengenai program dan kegiatan yang mendukung tercapainya indikator PKK Desa/Kelurahan Aktif, dapat dilihat pada tabel 3.15 berikut :

**Tabel 3.15**  
**Program/Kegiatan Menunjang Pencapaian Indikator Kinerja**  
**PKK Desa/Kelurahan Aktif**  
**Tahun 2019**

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Kinerja				Keuangan		
			Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan	Jumlah Peningkatan peran perempuan dalam pembangunan di Kecamatan/Kelurahan/Desa	Jumlah	70	45	85 %	48.340.000,-	48.230.300,-	99,98%
	Kegiatan Pembinaan PKK Kecamatan/Kelurahan/Desa	Jumlah anggota/kelompok yang dibina	Kelompok	14	9	99%	48.340.000,-	48.230.300,-	99,98%

**3 Sasaran :**  
***Meningkatnya Ketenteraman Dan Ketertiban Lingkungan***

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran “ Meningkatkan **Ketenteraman dan Ketertiban Lingkungan** “diukur melalui 2 ( dua ) indikator yaitu prosentase pelanggaran trantibmas yang ditangani dan indikator jumlah petugas linmas di kecamatan/desa”.

Indikator kinerja Sasaran tersebut berikut target dan realisasi disajikan pada tabel 3.16 berikut:

**Tabel 3.16**  
**Analisis Pencapaian Sasaran 3**  
**“Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Lingkungan” Tahun 2019**

**Dan Perbandingan dengan Target Akhir Renstra Tahun 2021**

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019		Capaian ( %)	Tahun 2021	Capaian ( %)
			Target	Realisasi		Target	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase Pelanggaran Trantibmas yang ditangani	%	80	80	100	100	100
2	Jumlah petugas Linmas di Kecamatan/ Desa	Orang	80	80	100	100	100
Rata- rata Capaian Kinerja					100		100

Sasaran Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan diukur melalui 2 ( dua ) indikator yang diperjanjikan yaitu Persentase Pelanggaran Trantibmas yang ditangani dan jumlah petugas Linmas di Kecamatan/ Desa. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja sasaran “ Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan” adalah sebesar 100 % yang berarti masuk dalam kategori capaian “Baik” .

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2018 dan tahun 2019 disajikan pada tabel 3.17 berikut

**Tabel 3.17**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 3**  
**Tahun 2018 dan 2019**

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018	Tahun 2019
1	2	3	4	5
1	Persentase Pelanggaran Trantibmas yang ditangani	%	100	100
2	Jumlah petugas Linmas di Kecamatan/ Desa	Orang	80	80

**1. Pencapaian Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat ( Trantibmas ) yang ditangani.**

Capaian kinerja indikator persentase Pelanggaran Trantibmas yang ditangani adalah sebesar **80 %** dari target sebesar **80 %** yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja 2019, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah **100%** atau mencapai target yang diperjanjikan.

Data penunjang capaian kinerja indikator persentase Pelanggaran Trantibmas ditangani yang diperoleh dari Kepala Seksi Tata Pemerintahan dan Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Pulau Hanaut.

Data diperoleh dari laporan masyarakat yang masuk ke Kecamatan atau sengketa tanah/ lahan yang perlu ditindaklanjuti, dengan penilaian sesuai tabel 3.18 berikut:

**Tabel 3.18**  
**Data Jumlah Pelanggaran/ Laporan Kejadian**  
**Yang ditindaklanjuti oleh Kecamatan Pulau Hanaut**  
**Tahun 2019**

No	Jenis Pelanggaran/ Laporan Kejadian	Pelanggaran/ Laporan	Tindak Lanjut	Capaian	Kepala Seksi yang menangani
----	-------------------------------------	----------------------	---------------	---------	-----------------------------

1	2	3	4	5	6
1.	Kebakaran Rumah	2	2	100%	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
2.	Kebakaran Hutan dan Lahan	7	7	100%	
Jumlah		9	9	100%	

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa jenis pelanggaran/ laporan kejadian yang paling banyak masuk yaitu berkaitan dengan permohonan untuk Kebakaran Hutan dan Lahan karena musim kemarau pada Tahun 2019 dan telah ditindaklanjuti oleh Kecamatan Pulau Hanaut melalui Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang diselesaikan melalui Desa.

Dengan perhitungan sebagai berikut:

Prosentase Pelanggaran Trantibmas yang ditangani

=

Jumlah pelanggaran keamanan dan ketertiban yang ditangani

Jumlah pelanggaran keamanan dan ketertiban yang dilaporkan

x

100%

=

13/13

x

100%

=

100%

Data tersebut diambil berdasarkan laporan masyarakat yang masuk ke Kecamatan Pulau Hanaut, kemudian ditindaklanjuti oleh Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum atau Kepala Desa yang berkaitan dengan Tugas pokok dan Fungsinya untuk penyelesaian laporan pelanggaran keamanan dan ketertiban tersebut.

Program pendukung capaian indikator persentase Pelanggaran Trantibmas yang ditangani adalah sebagai berikut:

- a. Program pengendalian Kebakaran Hutan
- Output dari program beserta kegiatan- kegiatan didalamnya adalah terlaksananya kegiatan rapat koordinasi dan sosialisasi pencegahan kebakaran hutan/ lahan dengan tujuan dapat meminimalisir kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Pulau Hanaut meskipun pda Tahun 2019 kasus ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan Tahun 2018.
- Dengan pagu anggaran sebesar Rp. 9.460.000,- dan dengan realisasi sebesar Rp. 4.730.000,- atau penyerapan anggaran sebesar 50%;
- b. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
- Output dari program beserta kegiatan- kegiatan didalamnya adalah terlaksananya kegiatan pembinaan pengurus RT/RW se- Kecamatan Pulau Hanaut, dengan tujuan agar Ketua RT/RW dapat berperan aktif dalam menggerakkan masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan masing- masing.
- Dengan pagu anggaran sebesar Rp. 0,- dan dengan realisasi sebesar Rp. 0,- atau penyerapan sebesar 0%.

Untuk lebih terperinci mengenai program dan kegiatan yang mendukung tercapainya indikator persentase Pelanggaran Trantimas yang ditangani, dapat dilihat pada tabel 3.19 berikut:

Tabel 3.19

**Program/ Kegiatan Menunjang Pencapaian Indikator Kinerja  
Persentase Pelanggaran Trantibmas Yang Ditangani  
Tahun 2019**

NO	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Kinerja				Keuangan		
			Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Anggaran ( Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	<b>Program Pengendalian Kebakaran Hutan</b>	<b>jumlah kasus kebakaran lahan dan hutan yang dapat ditangani</b>	Jumlah	7	7	100%	9.460.000,-	4.730.000,-	50%
	Kegiatan Koordinasi Pengendalian kebakaran hutan	Jumlah Persentase terlaksananya kegiatan koordinasi	Persentase	100%	100%	100%			100%
	Kegiatan Sosialisasi kebijakan pencegahan kebakaran hutan	Jumlah Persentase terlaksananya kegiatan sosialisasi	Persentase	100%	100%	100%			100%
2	<b>Program Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan</b>	<b>Persentase terlaksananya pembinaan terhadap ketua RT/RW</b>	Persentase	100%	100%	100%	9.460.000,-	4.730.000,-	50%
	Kegiatan Pembinaan pengurus RT/RW se Kecamatan	Jumlah persentase RT/RW yang dibina	Persentase	100%	100%	100%		,-	100%

**2. Pencapaian Petugas Linmas di Kecamatan/ Desa**

Capaian kinerja indikator jumlah petugas Linmas di Kecamatan/Kelurahan/Desa adalah 80 orang dari target sebanyak 80 orang yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja 2019, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100% sesuai target yang diperjanjikan.

Data penunjang capaian kinerja indikator jumlah petugas Linmas di Kecamatan/ Desa yang diperoleh dari Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Pulau Hanaut, sesuai tabel 3.20 berikut :

**Tabel 3.20  
Petugas Linmas di Kecamatan Pulau Hanaut  
Tahun 2019**

No	Kecamatan/Desa/Kelurahan	Jumlah Petugas Linmas
1	2	3
1.	Kecamatan Pulau Hanaut	10 orang

2.	Desa Satiruk	5 orang
3.	Desa Serambut	5 orang
4.	Desa Hantipan	5 orang
5.	Desa Bapinag Hilir Laut	5 orang
6.	Desa Babaung	5 orang
7.	Desa Babirah	5 orang
8.	Desa Bapinang Hilir	5 orang
	Desa Penyaguan	5 orang
	Desa Bamadu	5 orang
	Desa Bapinang Hulu	5 orang
	Desa Hanaut	5 orang
	Desa Makarti Jaya	5 orang
	Desa Rawa Sari	5 orang
	<b>Jumlah</b>	<b>80 orang</b>

Berdasarkan tabel tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa petugas Linmas Kecamatan/ Desa di Kecamatan Pulau Hanaut berjumlah 80 orang dari target 80 orang. Dimana data petugas Linmas tersebut hanya berasal dari petugas Linmas yang terdaftar di Kecamatan Pulau Hanaut.

Faktor yang menghambat pencapaian indikator tersebut karena biasanya petugas Linmas hanya aktif pada saat akan diadakan kegiatan Pemilihan Umum ( Pemilu ) atau Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) terutama untuk petugas Linmas TPS.

Pada Tahun 2019 telah dilakukan pendataan ulang petugas linmas sebagai upaya persiapan pemilu legislatif dan eksekutif yang akan dilaksanakan pada bulan April Tahun 2019 dan pengadaan pakaian linmas sesuai dengan data terakhir jumlah petugas linmas.serta dilakukan kegiatan pembinaan ke RT/RW agar dapat mengaktifkan petugas Linmas RT/RW, terutama untuk menjaga Poskamling RT/RW

Program pendukung capaian indikator jumlah petugas Linmas di Kecamatan/ Desa adalah

- Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan dengan kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 9.460.000,- dan realisasi sebesar Rp. 4.730.000,- atau persentase penyerapan anggaran sebesar 50%.
- Program Disiplin Aparatur dengan kegiatan pengadaan mesin absensi untuk meningkatkan kedisiplinan ASN Kecamatan melalui finger print serta pengadaan pakaian linmas, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.341.500,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.341.500,- atau persentase penyerapan anggaran sebesar 100%

Untuk lebih terperinci mengenai program dan kegiatan yang mendukung tercapainya indikator jumlah petugas Linmas di Kecamatan/ Desa, dapat dilihat pada tabel 3. 21 berikut:

**Tabel 3.21**  
**Program Kegiatan Menunjang Pencapaian Indikator Kinerja**  
**Jumlah Petugas Linmas di Kecamatan/ Desa**  
**Tahun 2019**

NO	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Kinerja				Keuangan		
			Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Presentase terlaksananya pengendalian Kamtibmas yang ditangani	Persentase	80%	80%	100%	9.460.000,-	4.730.000,-	50%
	Kegiatan Pengendalian keamanan lingkungan	Persentase jumlah kamtibmas yang ditangani	Persentase	80%	80%	100%			
2	Program Disiplin Aparatur	Persentase jumlah kamtibmas yang ditangani	Persentase	80%	80%	100%	,-		
	Kegiatan Pengadaan mesin/kartu absensi	Jumlah Pengadaan mesin/hartu absensi	Jumlah	1	1	100%	2.341.500,-	2.341.500,-	100%
	Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian dinas	Jumlah	74	74	100%	,-		

4

Sasaran :  
*Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan*

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran terhadap “**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan**” dapat diukur melalui 1(Satu) indikator yaitu Analisis pencapaian nilai AKIP Kecamatan Pulau Hanaut adalah sebesar **58** dari target sebesar **60** yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019,sehingga persentase capaian kinerjanya adalah **98%** .

Data penunjang capaian kinerja indikator nilai AKIP Kecamatan Pulau Hanaut yang diperoleh dari Sekretariat Kecamatan Pulau Hanaut pada Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan,yang berasal dari hasil revieu Inspektorat atas LKIP Kecamatan Pulau Hanaut Tahun 2018,dapat dilihat pada tabel 3.22 Berikut:

Tabel 3.22  
Data Nilai AKIP Kecamatan Pulau Hanaut Tahun 2018

No.	Komponen Pengukuran AKIP	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	60,86
	a.Perencanaan Strategis	47.04
	Pemenuhan Renstra	88.89
	Kualitas Renstra	50.00
	Implementasi Renstra	50.00
	b. Perencanaan Kinerja Tahunan	55.27
	Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan	91.67
	Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan	62.05
	Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan	50.00
2.	Pengukuran Kinerja	66.11
	a.Pemenuhan Pengukuran	75,00
	b.Kualitas Pengukuran	53.85
	c.Implementasi Pengukuran	37.50
3.	Pelaporan Kinerja	64.12
	a.Pemenuhan Pelaporan	80.00
	b.Penyajian Informasi Kinerja	67.86
	c.Pemanfaatan Informasi Kinerja	56.25
<b>Hasil Evaluasi AKIP Kecamatan Pulau Hanaut</b>		<b>58,80</b>

Berdasarkan data diatas maka dapat diambil kesimpulan Penilaian AKIP Kecamatan Pulau Hanaut Tahun 2019 58,80 dari 3 komponen pengukuran AKIP yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Timur. Dari hasil evaluasi dari Inspektorat terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan perbaikan

Adapun Indikator kinerja Sasaran tersebut berikut target dan realisasi disajikan pada tabel 3.23 berikut:

**Tabel 3.23**  
**Nilai AKIP Kecamatan**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Nilai AKIP Kecamatan	Nilai	60	58	98
		<b>Capaian Sasaran</b>			<b>98</b>

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja sasaran “ **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan** ”adalah sebesar **98 %** yang berarti masuk dalam katagori capaian **Berhasil**.

Untuk meningkatkan penilaian AKIP kecamatan Pulau Hanaut akan terus berupaya melakukan perbaikan,antara lain:

- a. Dokumen renstra dan IKU agar memuat indikator kinerja dan direviu secara berkala

- b. IKU agar dapat diukur secara obyektif, dan agar selaras dengan Dokumen IKU renstra.
- c. LKIP agar diupload ke dalam website
- d. Target kinerja agar ditetapkan dengan baik dan menggambarkan kondisi terkini.
- e. Informasi Kinerja dalam LKIP agar dapat diandalkan, menyajikan informasi mengenai capaian IKU, agar digunakan untuk perbaikan perencanaan, digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan.

Faktor penghambat optimalisasi peningkatan nilai AKIP Kecamatan Pulau Hanaut, antara lain:

1. adanya perubahan pada struktur organisasi sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, yang mengakibatkan kepala sub bagian dibawah Sekretariat Kecamatan yang tadinya 3 (tiga) bagian menjadikannya 2 (dua) bagian sehingga penambahan beban kerja
2. Kurangnya jabatan fungsional yang berada dibawah kepala suba bagian yang memiliki latar belakang pendidikan sesuai dengan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja.

Adapun Program/Kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran indikator Nilai AKIP Kecamatan adalah Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan Kegiatan Penyusunan Pelaporan akhir Tahun, dengan pagu anggaran sebesar Rp.0 dan realisasi sebesar Rp.0,- atau penyerapan anggaran sebesar 100 % .

Untuk lebih terperinci mengenai program dan kegiatan yang mendukung tercapainya indikator Nilai AKIP Kecamatan, dapat dilihat pada tabel 3.24 berikut:

**Tabel 3.24**  
**program dan kegiatan yang mendukung tercapainya indikator Nilai AKIP Kecamatan**

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Kinerja				Keuangan		
			Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Investasi Daerah	Persentase Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	%	100	100	100 %			100 %
	Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	%	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %			100 %

Selain itu juga mengenai perbandingan **realisasi kinerja** sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 disajikan pada tabel 3.25 berikut :

Tabel 3.25

No	Indikator Kinerja	Kinerja	Satuan	Tahun 2018	Tahun 2019
1.	Nilai AKIP Kecamatan	Realisasi	%	103	97
		Capaian	%	103	97

C. REALISASI ANGGARAN

Guna melaksanakan seluruh program dan kegiatan untuk mencapai sasaran yang diinginkan, Pemerintah Kecamatan Pulau Hanaut Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2019 mengalokasikan Belanja Tidak Langsung sebesar **Rp. 1.773.819.650,-** dan Belanja Langsung sebesar **Rp. 1.609.145.856.**

Adapun mengenai Data Anggaran dan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kecamatan Pulau Hanaut untuk tahun anggaran 2019 adalah tersaji sebagai berikut :

Tabel 3.26  
Alokasi dan Realisasi Anggaran Kecamatan Pulau Hanaut Tahun 2019

NO	KODE REKENING	DINAS/PROGRAM/KEGIATAN/URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN	LEBIH / (KURANG)		KET
					Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	5	BELANJA KECAMATAN PULAU HANAUT	3.352.150.900	3.092.762.660	(259.388.240)	92,25	
A.	5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.771.819.650	1.609.145.856	(164.673.794)	90,72	
	5 . 1 . 1 . 01	Gaji dan Tunjangan	928.088.000	852.385.541	(75.702.459)	91,84	
	5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	928.088.000	852.385.541	(75.702.459))	91,84	
	5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	108.922.800	96.277.416	(12.645.384)	88,39	
	5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	82.880.000	72.780.000	(10.100.000)	87,81	
	5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	-	-	-	-	
	5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	6.304.928	5.293.212	(3.600.000)	85,99	
	5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	48.600.000	44.176.200	(4.423.800)	90,90	
	5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	6.304.928	5.293.212	(1.011.716)	83,95	
	5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	18.132	12.060	(6.072)	66,51	
	5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	25.498.800	23.865.871	(1.632.929)	93,60	
	5 . 1 . 1 . 01 . 22	Iuran JKK	1.873.200	1.740.311	(132.889)	92,91	
	5 . 1 . 1 . 01 . 23	Iuran JKM	5.761.200	5.502.709	(258.491)	95,51	
	5 . 1 . 1 . 02	Tambahan Penghasilan PNS	540.182.590	485.022.536	(55.160.054)	89,79	

LKIP Kecamatan Pulau Hanaut Tahun Anggaran 2019

	5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	540.182.590	485.022.536	(55.160.054)	89,79	
B.	5.2.	BELANJA LANGSUNG	3.123.022.000	2.908.192.655	(214.829.345)	93,12	
01.	4.01.4.01.17.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	802.480.200	800.662.427	(1.817.773)	99,77	
1.	4.01.4.01.17.01 . 01 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.000.000	9.000.000	-	100,00	
	5 . 2 . 2 . 01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	9.000.000	9.000.000	-	100,00	
2.	4.01.4.01.17.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.000..000	6.000..000		100,00	
	5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	6.000.000	6.000.000		100,00	
3.	4.01.4.01.16.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	9.964.000	9.964.000	-	100,00	
	5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	9.964.000	9.964.000	-	100,00	
4.	4.01.4.01.17.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	401.096.760	401.096.760	(6.512,00)	99,99	
	5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	59.280.000	59.280.000	-	100,00	
	5 . 2 . 2 . 27 . 01	Belanja Upah Operasional Kegiatan	338.639.700	338.593.188	(46.512)	99,99	
5.	4.01.4.01.17.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	5.725.500	5.725.500	-	100,00	
	5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.600.000	1.600.000	-	100,00	
	5 . 2 . 2 . 27 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Pembersih	4.125.500	4.125.500	-	100,00	
6.	4.01.4.01.17.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	27.780.000	27.715.380	-	99,77	
	5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	16.940.000	16.895.130	(45.000)	99,74	
	5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis Perlengkapan Komputer dan Printer	10.840.000	10.820.250	(20.000)	99,82	
7.	4.01.4.01.17.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.400.000	8.181.300	(219.000)	97,40	
	5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.000.000	2.787.500	(212.500)	97,00	
	5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.400.000	5.393.800	(6.200)	99,89	
8.	4.01.4.01.17.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.625.000	3.603.600	(21.400)	99,41	
	5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3.625.000	3.603.600	(21.400)	99,41	
9.	4.01.4.01.17.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan	1.440.000	1.440.000	-	100,00	
	5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.440.000	1.440.000	-	100,00	
10.	4.01.4.01.17.01.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.800.000	7.727.643	(72.357)	99,07	
	5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	6.400.000	6.377.643	(24.683)	99,65	

11.	4.01.4.01.17.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	40.536.000	39.533.160	(1.002.840)	97,53	
	5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	19.116.000	18.266.160	(849.840)	95,55	
	5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	21.420.000	21.267.000	(153.000)	99,29	
12.	4.01.4.01.17.01.18	Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	92.000.000	91.617.400	(382.600)	99,58	
	5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	92.000.000	91.617.400	(382.600)	99,58	
13.	4.01.4.01.17.01.19	Rapat rapat Koordinasi di Dalam Daerah	200.000.000	200.000.000	-	100,00	
	5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	200.000.000	200.000.000	-	100,00	
02.	1.20.4.01.17.02	Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur	1.586.501.360	1.389.468.804	(18.095.345)	87,58	
1.	1.20.4.01.16.02.02	Pembangunan Rumah Dinas	249.750.000	258.199.000	(8.000.000)	99,38	
	5 . 2 . 3 . 49.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan – Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan II	249.750.000	258.199.000	(8.000.000)	99,38	
		Pembayaran Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	300.000	300.000	-	100,00	
2.	4.01.4.01.16.02.03	Pembangunan Gedung Kantor	1.209.000.000	1.015.090.000	(230.000)	83,96	
	5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan- Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	199.750.000	199.642.000	(50.000)	99,95	
	5 . 2 . 3 . 49 . 14	Belanja Modal Gedung dan Bangunan- Pengadaan Bangunan Gedung Garasi/Pool	50.000.000	49.470.000	(60.000)	98,94	
	5 . 2 . 3 . 49 . 27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan- Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	159.750.000	159.492.000	(120.000)	99,84	
	5 . 2 . 3 . 59 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan- Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	200.000.000	199.070.000	(930.000)	99,54	
	5 . 2 . 3 . 64 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan- Pengadaan Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai	399.500.000	399.196.000	(304.000)	99,92	
	5 . 2 . 3 . 69 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan- Pengadaan Air Tanah Dalam	200.000.000	8.220.000	(191.780.000)	4,11	
3.	4.01.4.01.17.02.09	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	2.700.000	2.676.000	(24.000)	99,11	
	5 . 2 . 3 . 30 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Meja Kerja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	2.700.000	2.676.000	(24.000)	99,11	
4.	4.01.4.01.16.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	39.010.984	38.970.334	(40.650)	99,90	
	5.2.3.27.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	8.897.700	8.897.700	-	100,00	
	5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Kantor lainnya	2.341.500	2.341.500	-	100,00	
	5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	14.004.600	13.963.950	(40.650)	99,71	
	5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Pendingin	8.889.059	8.889.059	-	100,00	

LKIP Kecamatan Pulau Hanaut Tahun Anggaran 2019

	5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Personal Komputer	4.878.125	4.878.125	-	100,00	
5.	4.01.4.01.16.02.20	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan</b>	<b>1.000.000</b>	<b>591.000</b>	<b>(409.000)</b>	<b>59,10</b>	
	5. 2 . 2 . 20 .05	Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan	1.000.000	591.000	(409.000)	59,10	
6.	4.01.4.01.16.02.22	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor</b>	<b>29.550.000</b>	<b>29.293.810</b>	<b>(256.190)</b>	<b>99,13</b>	
	5. 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	29.550.000	29.293.810	(256.190)	99,13	
7.	4.01.4.01.17.02.28	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan</b>	<b>39.966.376</b>	<b>39.837.500</b>	<b>(128.876)</b>	<b>99,68</b>	
	5. 2 . 3 . 5 . 1	Belanja Jasa service	3.000.000	2.952.000	(48.000)	98,40	
	5. 2 . 3 . 5 . 2	Belanja Penggantian Suku Cadang	15.558.376	15.477.500	(80.876)	99,48	
	5. 2 . 3 . 5 . 3	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	21.408.000	21.408.000	-	100,00	
03.	4.01.4.01.16.03	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>40.900.000</b>	<b>40.900.000</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>	
1.	4.01.4.01.16.05.01	<b>Pendidikan dan Pelatihan Formal</b>	<b>40.900.000</b>	<b>40.900.000</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>	
	5. 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	5.900.000	5.900.000	-	100,00	
	5. 2 . 2 . 17 . 03	Belanja Bimbingan Teknis	35.000.000	35.000.000	-	100,00	
04.	4.01.4.01.16.13	<b>Program Pengelolaan Keragaman Budaya</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>	
1.	4.01.4.01.17.06.04	<b>Penyelenggaraan Festival Habaring Hurung</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>	
	5 . 2 . 2 . 01.01	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	695.000	695.000	-	100,00	
	5. 2 . 2 . 11 .05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	550.000	550.000	-	100,00	
05.	2.06.4.01.16.15	<b>Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi</b>	<b>14.715.440</b>	<b>14.715.440</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>	
1.	2.06.4.01.16.15.12	<b>Pelaksanaan Sampit Expo</b>	<b>14.715.440</b>	<b>14.715.440</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>	
	5. 2 . 2 . 07 .02	Belanja Jasa Sewa Gedung/ Kantor/ Tempat	8.250.000	8.250.000	-	100,00	
	5. 2 . 2 . 08 .01	Belanja Sewa Sarana Mobiliias Darat	1.000.000	1.000.000	-	100,00	
	5. 2 . 2 . 11 .05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	720.000	720.000	-	100,00	
	5. 2 . 2 . 14 .05	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	4.743.440	4.743.440	-	100,00	
06.	1.05.4.01.16.15	<b>Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan</b>	<b>9.460.000</b>	<b>4.730.000</b>	<b>(4.730.000)</b>	<b>50,00</b>	
1.	1.05.4.01.16.15.05	<b>Pengendalian Keamanan Lingkungan</b>	<b>9.460.000</b>	<b>4.730.000</b>	<b>(4.730.000)</b>	<b>50,00</b>	
	5. 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Selain Hibah/ Bensos Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	9.460.000	4.730.000	(4.730.000)	50,00	
07.	4.01.4.01.4.01.17.16	<b>Program Penataan Daerah Otonomi Baru</b>	<b>600.725.000</b>	<b>589.588.444</b>	<b>(11.136.556)</b>	<b>98,15</b>	

LKIP Kecamatan Pulau Hanaut Tahun Anggaran 2019

1.	1.05.4.01.16.16.01	Fasilitas Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar Daerah	199.750.000	199.026.000	(724.000)	99.64	
	5 . 2 . 2 . 56 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan- Pengadaan Bangunan Tugu/ Tanda batas	199.750.000	199.026.000	(724.000)	99.64	
2.	4.01.4.01.16.16.03	Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan, Kemasyarakatan dan Hari-Hari Besar Nasional/Daerah	400.975.000	390.562.444	(10.412.566)	97.40	
	5 . 2 . 2 . 01.11	Belanja Spanduk/Umbul-umbul	17.500.000	17.491.040	(8.960)	99.95	
	5 . 2 . 2 . 03.13	Belanja Jasa Transportasi dan Akomdasi	18.000.000	18.000.000	-	100,00	
	5 . 2 . 2 . 08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	12.000.000	12.000.000	-	100,00	
	5 . 2 . 2 . 08.02	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	1.000.000	1.000.000	-	100,00	
	5 . 2 . 2 . 11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	22.500.000	20.624.104	(1.875.896)	91.66	
	5 . 2 . 2 . 14.05	Belanja Pakaian Seragam Kegiatan	31.225.000	31.214.300	(11.000)	99.97	
	5 . 2 . 2 . 30.02	Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan	99.000.000	91.350.000	(7.650.000)	92.27	
	5 . 2 . 2 . 49.08	Belanja Modal Gedung dan Bangunan- Pengadaan Bangunan	199.750.000	198.883.000	(178.933)	99.57	
08.	2.07.4.01.16.19	Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan	48.240.000	48.230.300	(9.700)	99.98	
1.	2.07.4.01.16.19.06	Pembinaan Kegiatan PKK Kecamatan/Kelurahan/Desa	48.240.000	48.230.300	(9.700)	99.98	
	5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.140.000	4.131.000	(50.000)	99,78	
	5 . 2 . 2 . 14 . 05	Belanja Pakaian Seragam Kegiatan	1.500.000	1.500.000	-	100,00	
	5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.800.000	16.800.000	-	100,00	
	5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.80.000	25.80.000	-	100,00	
09.	2.05.4.01.16.22	Program Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	8.000.000	8.000.000	-	100,00	
1.	4.03.4.01.16.22.03	Koordinasi Pengendalian Kebakaran Hutan	8.000.000	8.000.000	-	100,00	
	5 . 2 . 2 . 03.13	Belanja Jasa Transportasi dan Akomondasi	4.000.000	4.000.000	-	100,00	
	5 . 2 . 2 . 11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.000.000	4.000.000	-	100,00	
10.	2.13.4.01.16.22	Program Pembinaan Pemberdayaan Remaja,Pemuda, Perempuan dan Olah raga	7.000.000	6.897.240	(8102.760)	98,53	
	2.13.4.01.16.22.01	Pembinaan UKS se-Kecamatan	3.500.000	3.427.000	(72.000)	97,92	
	5 . 2 . 2 . 11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.500.000	3.427.000	(72.000)	97,92	
1.	2.05.4.01.17.22.03	Pembinaan Pemberdayaan Perempuan, Pemuda, Olah raga dan Kebudayaan	3.500.000	3.470.040	(29.960)	99.14	
	5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.500.000	3.470.040	(29.960)	99.14	

Dari data diatas menunjukan bahwa secara keseluruhan Kantor Kecamatan Pulau Hanaut telah menganggarkan pembiayaan seluruh kegiatannya sebesar **Rp. 4.896.841.650,00** dengan realisasi penyerapan sebesar **Rp4.517.336.511,00** atau capaian kinerja keuangan **92,25 %**.

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran sesuai renstra Kecamatan Pulau Hanaut Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.27**  
**Sasaran, Indikator Sasaran dan Realisasi Keuangan**  
**Kecamatan Pulau Hanaut Tahun 2019**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja				Keuangan		
			Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Prima	Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	Baik	Baik	100%	802.480.200,-	800.662.427,-	99,77 %
		Persentase Usulan yang tertampung dalam Musrenbang RKPD di Kecamatan	%	100	100	100 %			100 %
2.	Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Desa/Kelurahan	Persentase desa/kelurahan yang telah selesai tapal batas	%	100	100	100 %	199.750.000,-	199.026.000,-	99,64%
		Persentase Desa/Kelurahan yang tertib Administrasi	%	80	80	100 %			100%
		Persentase Lembaga Perekonomian Milik Desa	%	75	75	100 %			100 %
		Jumlah PKK Desa/Kelurahan yang aktif	Jumlah	14	9	85 %			83,09 %
3.	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan	Persentase Pelanggaran Trantibmas yang ditangani	%	80	80	100 %	9.400.000,-	4.730.000,-	50%
		Jumlah Petugas Linmas di Kecamatan/Kelurahan/Desa	Orang	80 Orang	80 Orang	100 %			99,07 %

4.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai AKIP Kecamatan	Nilai	55	53,39	97,07%			100 %
Nilai Rata-rata Pencapaian/Jumlah Anggaran						98	1.010.902.800	1.004.418.427	96,38%

Secara umum efektivitas anggaran terhadap capaian sasaran Kecamatan Pulau Hanaut disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan efektif terhadap capaian kinerja sasaran Kecamatan Pulau Hanaut, dimana nilai rata-rata capaian indikator kinerja sasaran 97,38 % dengan realisasi penggunaan anggaran untuk mencapai target tersebut sebesar 96,38 % dimana terdapat efisiensi anggaran sebesar 7,75 % atau terdapat silpa sebesar Rp. 379.503.139,-

## BAB IV PENUTUP

### A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan analisa yang telah dikemukakan, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKIP) Kecamatan Pulau Hanaut disusun sebagai *wujud dukungan* terhadap sistem administrasi yang diharapkan mampu menjamin kelancaran dan keserasian tugas aparatur dalam jangka waktu 1 ( satu ) tahun.
2. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKIP) Kecamatan Pulau Hanaut Kabupaten Kotawaringin Timur diharapkan dapat berperan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kerja dan alat stimulasi dalam mewujudkan good governance dan sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat/ publik.
3. Rencana Kinerja Tahunan ( RKT ) berfungsi sebagai parameter atau ukuran yang dapat menunjukan, menentukan, memberi suatu ide atau memberikan dasar untuk mengambil kesimpulan atas sesuatu.
4. Dokumen Penetapan Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/ kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan sumber daya yang dimiliki oleh instansi.

5. Dari 4 ( empat ) sasaran yang telah ditetapkan terdapat 10 ( Sepuluh ) indikator kinerja sasaran, pada tahun 2019 rata- rata mencapai 98 % atau bernilai Baik Sekali, dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik mencapai 100% melalui 2 ( dua ) indikator yaitu pencapaian rata- rata indeks kepuasan masyarakat mencapai 100% dari target nilai Baik, dan pencapaian prosentase usulan yang tertampung dalam hasil Musrenbang RKPD di Kecamatan mencapai 100 % yaitu 100 % usulan dari target 100 %;
  - b. Meningkatnya kualitas pemerintahan Desa mencapai 96,25 % melalui 4 ( empat ) indikator yaitu pencapaian prosentase Desa yang telah selesai tata batas mencapai 100 % dengan realisasi 100 % dari target 100 % pencapaian prosentase Desa yang tertib administrasi mencapai 100% dari target 80% pencapaian prosentase Lembaga perekonomian milik Desa mencapai 100 % dari target 75 % dan Jumlah PKK Desa aktif mencapai 99,98% dari target 9 Desa;
  - c. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban lingkungan mencapai 100 % melalui 1 ( satu) indikator yaitu pencapaian persentase pelanggaran Trantibmas yang ditangani mencapai 100 % dari target 80 % dan pencapaian jumlah petugas Linmas Kecamatan/ Desa mencapai 100% dari target 80 orang terealisasi 80 orang;
  - d. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan mencapai 97,07 %, melalui 1 ( satu) indikator yaitu pencapaian Nilai AKIP Kecamatan mencapai 97,07 % dari target nilai 60 terealisasi nilai 55.

Hasil analisis pencapaian indikator sasaran terhadap 4 ( empat) sasaran yang mencakup 9 ( sembilan ) indikator kinerja sasaran, diketahui bahwa 4 ( empat ) indikator sasaran 100 % Baik.

Anggaran yang digunakan efektif terhadap capaian kinerja sasaran Kecamatan Pulau Hanaut, dimana nilai rata-rata capaian indikator kinerja sasaran 98 % dengan realisasi penggunaan anggaran untuk mencapai target tersebut sebesar **96,38 %** dimana terdapat efisiensi anggaran sebesar 3,62 %, atau terdapat Silpa sebesar Rp. 61.467.372,- dari Pagu Anggaran yang mendukung pencapaian sasaran sebesar Rp.**3.123.022.000,-** terealisasi sebesar Rp. **2.908.192.655.-**

## B. SARAN

Dalam pengumpulan dan penyusunan Data Laporan Kinerja Pemerintah Daerah secara maksimal karena masing- masing bagian kurangnya sumber daya aparatur pendidikan formil maupun diklat, kurangnya motivasi pegawai dalam segala bentuk kegiatan.

Adapun yang menjadi catatan penting dan merupakan kekurangan dalam penyusunan LKIP Kecamatan Pulau Hanaut antara lain:

1. Target Kinerja agar ditetapkan dengan baik dan dengan satuan target yang jelas, terukur dengan mempertimbangkan kondisi terkini dan menggambarkan sasaran tersebut dapat tercapai.
2. Agar segera melakukan revisi terhadap Dokumen Renstra karena penetapan indikator kinerja menggambarkan kondisi yang tidak relevan lagi seperti contoh penetapan Petugas linmas Kecamatan/desa sangat melampaui target yang telah ditetapkan.

3. Pembuatan IKU (Indikator Kinerja Utama) dapat diukur secara obyektif dan agar direvisi kembali.

Guna mewujudkan indikator kinerja sasaran strategis yang belum mencapai target yang diharapkan atau belum maksimal realisasinya, pada waktu yang akan datang akan ditempuh berbagai langkah sebagai berikut :

1. Mempertajam penyusunan rencana biaya/ anggaran melalui RKA/ RKT dan DPA dengan melibatkan semua aparatur terkait;
2. Melakukan evaluasi per triwulan atau per semester atau setiap akhir tahun anggaran dari setiap kegiatan yang telah dilaksanakan;
3. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi internal dan eksternal secara intensif dengan pihak Desa dan Masyarakat se Kecamatan Pulau Hanaut;
4. Membuat dokumentasi, pencatatan dan pengarsipan khusus atas semua data yang diperlukan dalam penyusunan LKIP;
5. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur/ staf dengan mengikutsertakan dalam Diklat LKIP atau Diklat, bimbingan teknis lainnya yang diperlukan;
6. Secara bertahap melengkapi sarana dan prasarana kerja guna menunjang kelancaran aktifitas pelayanan kepada publik.

Penyusunan LKIP Kecamatan Pulau Hanaut Kotawaringin Timur ini masih belum sempurna, karena itu perlu sarana/ masukan yang positif pada masa yang akan datang.

Matrik / Carcasing Sasaran SOPD

Instansi : KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR  
SOPD : KECAMATAN PULAU HANAUT  
Visi : TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG MADANI, DINAMIS, MANDIRI DAN BERDAYA SAING DALAM SUASANA RELIGIUS, KEBERSAMAAN, AMAN DAN SEJAHTERA  
Tahun : 2018 – 2021

No.	MISI SOPD	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien	Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik yang Prima	Indeks kepuasan masyarakat	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah pelayanan administrasi kantor yang tersedia selama setahun sesuai dengan capaian indikator	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Menyediakan jasa surat menyurat kantor	Jumlah surat yang dilayani dalam setahun
									Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya air	Menyediakan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah bidang/bagian/seksi yang dilayani dalam setahun
									Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Menyediakan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor dalam setahun
									Penyediaan Jasa administrasi keuangan	Menyediakan jasa administrasi keuangan	Jumlah administrasi keuangan yang selesai tepat waktu
									Penyediaan Jasa kebersihan kantor	Menyediakan jasa kebersihan kantor	Luas kantor yang dilayani jasa kebersihan
									Penyediaan Alat Tulis Kantor	Menyediakan alat tulis kantor	Jumlah bidang/bagian/seksi yang terpenuhi alat tulis kantor
									Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Menyediakan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan
									Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Menyediakan komponen listrik kantor	Jumlah komponen yang disediakan
									Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Menyediakan bahan bacaan / surat kabar	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan
									Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Menyediakan bahan logistik kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan
									Penyediaan Makanan dan Minuman	Menyediakan makanan dan minuman rapat/kegiatan	Jumlah PNS/jumlah peserta rapat/kegiatan yang dilayani makan dan minum

No.	MISI SOPD	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									Rapat-Rapat Konsultasi dan Koordinasi Ke Luar Daerah	Mengikuti rapat koordinasi/konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat koordinasikonsultasi ke luar daerah yang dihadiri
									Rapat-Rapat Konsultasi dan Koordinasi Ke Dalam Daerah	Menghadiri rapat koordinasi/konsultasi di dalam daerah	Jumlah rapat koordinasi/konsultasi ke dalam daerah yang dihadiri
						Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur kecamatan/kelurahan yang memadai	Cakupan (%) aparatur yang dilayani sarana dan prasarana memadai	Pembangunan Gedung Kantor	Meningkatkan kinerja aparatur kecamatan	Jumlah gedung kantor yang dibangun
									Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Meningkatkan kinerja aparatur kecamatan	Jumlah gedung kantor yang diperilahara
									Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Meningkatkan kinerja aparatur kecamatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara
									Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Meningkatkan kinerja aparatur kecamatan	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara
									Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Meningkatkan kinerja aparatur kecamatan	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara
						Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas/pengetahuan pegawai kecamatan	Jumlah sumber daya aparatur yang meningkatkan kapasitasnya	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Meningkatnya pengetahuan/keterampilan pegawai	Jumlah aparatur yang mendapat Diklat/Bimtek
									Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Meningkatkan Pengetahuan pegawai tentang undang-undang	Jumlah aparatur yang mendapat Sosialisasi
						Program Penataan Administrasi Kependudukan	Menyelesaikan perekaman e-KTP di kecamatan	Prosentase jumlah penduduk yang telah melakukan perekaman e-KTP	Pembentukan dan Penataan Sistem Koneksi (Inter-Phase Tahap Awal) NIK	Menyelesaikan perekaman e-KTP di kecamatan	Jumlah personil yang melakukan perekaman e-KTP
						Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Meningkatnya pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan di kecamatan	Prosentase pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan	Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan, Kemasyarakatan dan Hari-Hari Besar Nasional/Daerah	Meningkatkan kegiatan keagamaan, kemasyarakatan dan hari-hari besar nasional/daerah	Kegiatan keagamaan, kemasyarakatan dan hari-hari besar nasional/daerah dilaksanakan

NO.	MISI SOPD	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Jumlah usulan yang tertampung dalam hasil Musrenbang di Kecamatan	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya angka partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Jumlah usulan yang tertampung dalam hasil musrenbang RKPD di Kecamatan	Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Meningkatkan angka partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah	Jumlah masyarakat/organisasi yang hadir dalam kegiatan Musrenbang di Kecamatan
2		Meningkatkan Penguatan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Jumlah desa/kelurahan yang tertib administrasi	Meningkatnya kualitas pemerintahan desa/kelurahan	Jumlah Desa/Kelurahan Yang Tertib Administrasi	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Meningkatkan status desa/kelurahan	Jumlah peningkatan perkembangan status desa/kelurahan	Kegiatan Evaluasi Pengembangan Desa dan Kelurahan	Meningkatkan status desa/kelurahan	Jumlah desa/kelurahan yang di evaluasi
						ProgramPembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Meningkatkan tertib administrasi pengelolaan keuangan desa	Jumlah dokumen pengelolaan keuangan desa yang telah di review	Kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes	Meningkatkan tertib administrasi pengelolaan keuangan desa	Jumlah rancangan Perdes tentang APBDes yang dievaluasi
					Jumlah Lembaga Perekonomian Milik Desa/Kelurahan	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Meningkatnya produk unggulan kecamatan yang dipromosikan	Jumlah peningkatan produk unggulan kecamatan yang dipromosikan	Kegiatan Pelaksanaan Sampit Expo	Meningkatkan promosi produk unggulan kecamatan	Jumlah kegiatan expo yang diikuti
					Jumlah PKK Desa/Kelurahan Yang Aktif	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	Meningkatkan pembinaan PKK Kecamatan/kelurahan/desa	Jumlah peningkatan peran perempuan dalam pembangunan di kecamatan/kelurahan/desa	Kegiatan Pembinaan Kegiatan PKK Kecamatan/Kelurahan/Desa	Meningkatkan pembinaan PKK kecamatan/kelurahan /desa	Jumlah anggota/kelompok yang dibina
3		Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan	Tertanganinya pelanggaran trantibmas	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban lingkungan	jumlah Pelanggaran Trantibmas Yang Ditangani	Program Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Meningkatnya penanganan kebakaran lahan dan hutan yang ditangani	Jumlah kasus kebakaran lahan dan hutan yang dapat ditangani	Kegiatan Koordinasi Pengendalian Kebakaran Hutan	Meningkatnya koordinasi dalam upaya pengendaliasn kebakaran hutan	Jumlah kegiatan koordinasi yang dilaksanakan
									Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pencegahan Kebakaran Hutan	Meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap pencegahan kebakaran hutan	Jumlah peserta sosialisasi
						Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	Menyelesaikan laporan konflik-konflik pertanahan yang masuk	Jumlah penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	Menyelesaikan laporan konflik-konflik pertanahan yang masuk	Jumlah konflik-konflik pertanahan yang difasilitasi

NO.	MISI SOPD	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban Dan Keamanan	Meningkatkan peran serta RT/RW dalam menjaga Kamtibmas	Prosentase keterlibatan masyarakat melalui RT/RW dalam menjaga kamtibmas	Pembinaan Pengurus RT/RW se-Kecamatan	Meningkatkan pengetahuan RT/RW untuk menjaga Kamtibmas	Jumlah RT/RW yang dibina
					Jumlah petugas linmas di kecamatan/kelurahan.desa	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Meningkatkan peran serta masyarakat dan anggota linmas dalam menjaga Kamtibmas	Prosentase peningkatan kamtibmas	Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan	Meningkatkan peran serta masyarakat dan anggota linmas dalam menjaga Kamtibmas	Jumlah pelanggaran kamtibmas yang ditangani

CAMAT PULAU HANAUT

Ir.H.EDDY MASHAMY, MM  
NIP. 19630827 199303 1 007



**PENGUKURAN KINERJA  
KECAMATAN PULAU HANAUT  
TAHUN 2019**

Provinsi / Kabupaten : Kalimantan Tengah / Kotawaringin Timur  
Nama SOPD : Kecamatan Pulau Hanaut

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Prima	1. Jumlah Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan.	Nilai	Baik	Baik	100
		2. Persentase Usulan Yang Tertampung Dalam Hasil Musrenbang RKPD di Kecamatan	%	100	100	100
Capaian Sasaran						100
2.	Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Desa	1. Persentase Desa Yang Telah Selesai Tata Batas	%	100	100	100
		2. Persentase Desa Yang Tertib Administrasi	%	80	80	100
		3. Persentase Lembaga Perekonomian Milik Desa	%	75	75	100
		4. Jumlah PKK Desa Yang Aktif	Desa	9	9	85
Capaian Sasaran						96,25
3.	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan	1. Persentase Pelanggaran Trantibmas yang tertangani.	%	80	80	100
		2. Jumlah Petugas Linmas di Kecamatan dan Desa	Orang	80	80	100
Capaian Sasaran						100
4.	Meningkatnya Akuntanbilitas Kinerja Kecamatan	1. Meningkatkan Akuntanbilitas Kinerja Kecamatan	Nilai	60	58,80	98,00
Capaian Sasaran						98,00
Capaian Rata-Rata Kinerja						98

**Jumlah Anggaran Tahun 2019 : Rp. 3.123.022.000,-**

**Jumlah Realisasi Anggaran Tahun 2019 : Rp. 2.908.192.655,-**

### INDIKATOR KINERJA KECAMATAN PULAU HANAUT YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

NO.	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		TAHUN 0 (2015)	TAHUN 1 (2016)	TAHUN 2 (2017)	TAHUN 3 (2018)	TAHUN 4 (2019)	TAHUN 5 (2020)	TAHUN 6 (2021)	
1	2	3	4	5	6	7	8		9
1.	Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	NA	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
2.	Prosentase usulan yang tertampung dalam hasil Musrenbang RKPD di Kecamatan	80	100	100	100	100	100	100	100
3.	Jumlah desa/kelurahan yang telah selesai tata batas	0	5	3	3	3	0	0	14
4.	Prosentase desa/kelurahan yang tertib administrasi	0	9	9	9	9	9	9	9
5.	Prosentase ketersediaan sarana dan prasarana pemerintahan desa/kelurahan	100	100	100	100	100	100	100	100
6.	Jumlah lembaga perekonomian milik desa/kelurahan	0	2	2	2	9	9	9	9
7.	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK Kecamatan	0	0	9	9	9	9	9	9
8.	Jumlah PKK Desa/Kelurahan aktif	0	0	9	9	9	9	9	9

NO.	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		TAHUN 0 (2015)	TAHUN 1 (2016)	TAHUN 2 (2017)	TAHUN 3 (2018)	TAHUN 4 (2019)	TAHUN 5 (2020)	TAHUN 6 (2021)	
1	2	3	4	5	6	7	8		9
9.	Prosentase pelanggaran trantibmas yang ditangani	0	100	100	100	100	100	100	100
10.	Jumlah petugas linmas di kecamatan/kelurahan/desa	0	0	80	80	80	80	80	80

